

Laporan Penelitian

**Periodesasi Konflik Tapal Batas Nagari Saniang Baka dan Muaro Pingai
Kabupaten Solok Sumatera Barat**

Karya Ilmiah untuk melengkapi Syarat pengajuan kenaikan Pangkat Pada Fakultas Ilmu
Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial

Oleh:

**YUMMY JUMIATI MARSA, M.Pd
Nip. 199003012019032012**

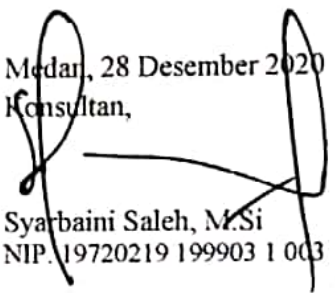


**PROGRAM STUDI TADRIS IPS
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
2020**

REKOMENDASI

Setelah membaca dan menelaah hasil penelitian yang berjudul "Periodesasi Konflik Tapal Batas Nagari Saniang Baka dan Muaro Pingai Kabupaten Solok Sumatera Barat" yang dilaksanakan oleh Yummy Jumiati Marsa, M.Pd, maka saya berkesimpulan bahwa hasil penelitian ini dapat diterima sebagai karya tulis berupa hasil penelitian. Demikianlah rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 28 Desember 2020
Konsultan,


Syarbaini Saleh, M.Si
NIP. 19720219 199903 1 003

LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yummy Jumizati Marsa, M.Pd

NIP : 19900301 201903 2 012

Alamat : Jl. Benteng Hilir Perumahan Banyu Indah Tembung

Judul Penelitian : Periodisasi Konflik TapaL. Batas Nagari Saniang

Baka dan Muaro Pingai Kabupaten Solok Sumatera Barat

Menyatakan bahwa dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan dapat disebutkan di dalam kutipan dan sumber pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Medan, 25 Januari 2021



Yummy Jumizati Marsa, M.Pd

ABSTRAK

Yummy Jumiati Marsa. 2020. “Periodesasi Konflik Tapal Batas. (*Studi Kasus Nagari Saniang Baka dan Nagari Muaro Pingai Kabupaten Solok, Sumatera Barat*)”.

Kata Kunci: Periodesasi, Konflik, Tapal Batas, Nagari

Konflik tapal batas antara Nagari Saniang Baka dan Nagari Muaro Pingai telah terjadi dari tahun 1995, bahkan sampai pada tahun 2014 belum terselesaikan. Para elit pemerintahan Kabupaten Solok telah melakukan pertemuan untuk menyelesaikan masalah tapal batas tersebut. Dari pertemuan itu terdapat beberapa kesepakatan seperti penetapan status quo terhadap wilayah yang disengketakan dan penetapan penerima bantuan kepada korban kerusuhan tahun 2008. Hasil kesepakatan itu telah disosialisasikan, namun masyarakat yang bertikai mengalami dua perbedaan sikap. Pihak Saniang Baka membenarkan hasil kesepakatan tersebut sedangkan pihak Muaro Pingai menolak hasil kesepakatan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini mengungkap mengapa adanya perbedaan sikap masyarakat Saniang Baka dan Muaro Pingai dalam menyikapi konflik tapal batas.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Edward Azar. Menurut Azar, konflik itu mempresentasikan perjuangan yang berkepanjangan yang sering kali penuh kekerasan oleh kelompok komunal untuk keperluan dasar seperti keamanan, pengakuan, dan penerimaan akses yang adil bagi institusi politik dan partisipasi ekonomi. Perjuangan yang berkepanjangan tersebut muncul karena adanya hak-hak masyarakat lokal yang terampas atau terambil oleh pihak luar. Perampasan tersebut dapat berupa pengakuan kepemilikan atas lahan, yang kemudian memunculkan konflik yang berkepanjangan antara dua kelompok yang memperebutkan lahan itu. Adapun penyelesaian tidak sesuai dengan keinginan masing-masing pihak yang bertikai, sehingga memunculkan perjuangan yang berkepanjangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus instrumental. Informan penelitian ini berjumlah 19 orang. Teknik pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi partisipasi pasif, studi dokumentasi dan wawancara mendalam, peneliti melakukan triangulasi data. Analisis dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Mathew Miles dan Hubermans.

Hasil penelitian ini yaitu mengungkap periodesasi konflik yang terjadi antara masyarakat Nagari Saniang Baka dan Muaro Pingai, yaitu: (1) tahun 1995; (2) Tahun 2014; (3) Tahun 2008.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
 BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Kerangka Teoritis	15
F. Penjelasan Konsep	20
1. Konflik.....	20
2. Tapal Batas.....	21
3. Sikap	22
4. Nagari	23
G. Metodologi Penelitian.....	24
1. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	24
2. Pendekatan dan tipe penelitian.....	25
a. Pendekatan	25
b. Tipe penelitian	26
c. Informan Penelitian.....	26
3. Teknik pengumpulan data.....	27

a. Observasi.....	28
b. Wawancara.....	29
c. Studi Dokumentasi.....	31
4. Validitas data.....	32
5. Teknik analisa data.....	32

BAB II NAGARI SANIANG BAKA DAN MUARO PINGAI

A. Nagari Saniang Baka

1. Keadaan Geografis.....	32
2. Penduduk.....	33
3. Pendidikan.....	36
4. Mata Pencarian.....	36
5. Kekerabatan.....	38
6. Kekerabatan.....	38
7. Sistem terurial.....	38

B. Nagari Muaro Pingai

1. Keadaan Geografis.....	32
2. Penduduk.....	33
3. Pendidikan.....	36
4. Mata Pencarian.....	36
5. Kekerabatan.....	38
6. Kekerabatan.....	38
7. Sistem terurial.....	38

BAB III PERIODESASI KONFLIK NAGARI SANIANG BAKA DAN MUARO PINGAI KABUPATEN SOLOK SUMATERA BARAT

A. Konflik tahun 1995.....	42
B. Konflik 2003.....	43
C. Konflik 2008.....	54

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial sebab, dalam memenuhi kebutuhannya manusia membutuhkan manusia lain. Hal itu dapat terwujud dengan adanya proses interaksi yang dijalani oleh manusia itu sendiri. Proses interaksi itu ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak negatif. Dampak positif dari proses interaksi itu terciptanya suasana yang kondusif, aman dan nyaman. Adapun dampak negatif dari proses interaksi yaitu munculnya suasana yang tidak nyaman, tidak kondusif bahkan bisa menyebabkan adanya konflik.

Konflik ini akan selalu ada dalam kehidupan manusia. Jika interaksi dalam kehidupan manusia masih berjalan, maka potensi konflik juga akan ada di dalamnya. Konflik tersebut dapat berupa konflik dalam diri individu, antar individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Konflik dalam diri individu dan antar individu dapat dikategorikan sebagai konflik yang *micro*, sebab dampak konflik hanya melibatkan personal atau beberapa individu. Sedangkan konflik antar individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok dapat dikatakan sebagai konflik yang *macro*.¹ Hal ini disebabkan oleh banyaknya orang yang terlibat dan dampak yang terjadi dari konflik tersebut.

Konflik *macro* tersebut bisa terjadi pada masyarakat yang majemuk, sebab masyarakat tersebut masih disatukan oleh ikatan primordial. Ikatan primordial ini dapat menumbuhkan potensi konflik dalam masyarakat. Hal itu disebabkan oleh ikatan primordial tersebut cenderung memandang sesuatu secara

¹ <http://bentuk-konflik-sosial.co.id> , diakses pada tanggal 26-5 2012

subjektif bukan objektif. Adapun ikatan promordial yang berujung pada konflik dapat kita lihat pada konflik yang terjadi antara Etnik Dayak dan Etnik Madura.

Konflik yang terjadi antara etnik Madura dengan etnik Dayak merupakan konflik terbuka. Hal ini disebabkan oleh konflik itu muncul ke permukaan dan diketahui oleh masyarakat luas. Bahkan konflik ini sampai menjadi berita nasional. Pemberitaan konflik ini menunjukkan tingginya subjektifitas masyarakat dalam melihat suatu permasalahan.²

Subjektifitas itu disebabkan oleh adanya kondisi masyarakat yang terdiri dari beragam suku bangsa. Di Indonesia terdapat lebih dari 3000 suku bangsa yang memiliki identitas kebudayaan sendiri.³ Setiap suku bangsa mengakui memiliki unsur-unsur kebudayaannya seperti wilayah teritorial, bahasa lokal, kebudayaan dan adat istiadat sendiri. Unsur kebudayaan antar suku bangsa memiliki perbedaan dan perbedaan itulah yang sulit dipahami oleh suku bangsa lainnya. Perbedaan itu juga dapat menimbulkan sikap etnosentrisme yang dapat memicu konflik dalam masyarakat.

Potensi konflik pada masyarakat Indonesia dua tahun belakangan ini terdapat peningkatan. Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, mengatakan jumlah konflik sosial di tanah air semakin meningkat. "Jumlah konflik sosial meningkat pada tahun ini mencapai 89 kasus hingga Agustus," ujar Gamawan. Data yang dimiliki Kemendagri, memperlihatkan jumlah konflik sosial pada tahun 2010 sebanyak 93 kasus. Kemudian terjadi penurunan pada tahun 2011 menjadi 77 kasus. Namun pada tahun 2012 meningkat menjadi 89 kasus hingga akhir Agustus. "Untuk itu perlu sensitivitas dari Kesbangpol dan pemerintah daerah

² <http://konflikmadura-dayak.co.id>

³ Liliweri, Alo. 2005. "Prasangka dan Konflik : Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural". Yogyakarta. LKiS. Halm 6

untuk mendeteksi dini semua potensi konflik," tambahnya. Menurut beliau, aparat ditingkat kabupaten ataupun kecamatan seharusnya bisa memadamkan api konflik selagi masih kecil dan jangan ditunggu konflik membesar baru dipadam.⁴

Konflik biasanya muncul karena hubungan konfrontatif dalam kelompok sosial di masyarakat. Hubungan yang konfrontatif tersebut dapat berupa pertikaian atau perselisihan paham hingga terjadinya kontak fisik. Hubungan konfrontatif tersebut juga dialami oleh masyarakat yang mendiami wilayah Sumatera Barat. Sehingga, pada masyarakat ini terdapat potensi konflik dan jenis-jenis konflik yang terjadi di dalamnya.

Dilihat dari jenis konflik di Sumatera Barat, konflik dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, yaitu: 1) konflik mengenai sengketa lahan, 2) konflik perbatasan, 3) konflik antar kaum adat atau klan tertentu. Namun yang selalu mewarnai konflik di Sumatera Barat adalah konflik tanah ulayat yang berada di perbatasan, seperti konflik perbatasan antara Provinsi Sumatera Barat dengan beberapa provinsi di Pulau Sumatera, kemudian konflik antara batas nagari yang ada di Sumatera Barat. Persoalan tanah merupakan hal yang sangat sensitif bagi masyarakat di Sumatera Barat. Terutama tanah atau lahan yang berada di perbatasan. baik itu perbatasan provinsi, kabupaten atau kota, maupun nagari. Persoalan perbatasan ini telah menjadi dinamika dalam masyarakat Sumatera Barat. Menurut data Q-Bar tahun 2009 telah ada lebih kurang 543 nagari yang berpotensi konflik di perbatasan. Adapun catatan dari Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat terdapat 6 nagari yang telah terjadi konflik.⁵ Berikut tabel nagari yang berpotensi konflik di Sumatera Barat:

⁴ <http://www.waspada.co.id>, Diakses 25-08-12

Tabel 1.1 Nagari Yang Berkonflik Di Sumatera Barat

NO	Nagari yang berpotensi konflik	Kabupaten
1.	Nagari Aua Kuniang versus Aia Tabik	Lima Puluh Kota
2.	Nagari Pangkalan versus Kapur Sembilan	Lima Puluh Kota
3.	Palembayan versus Lawang	Agam
4.	Saniang Baka versus Muaro Pingai	Kab. Solok
5.	Sibusuak versus Kampung Baru	Sawahlunto
6.	Siguntur versus Aka Lunang	Pesisir Selatan

Data : LKAAM dikutip dari www.Padangekspres.com. Tahun 2010

Konflik yang terjadi pada enam nagari tersebut merupakan sebagian besar dari konflik perbatasan yang ada di Sumatera Barat. Konflik itu tidak merupakan konflik laten lagi. Hal ini disebabkan konflik yang terjadi itu telah mencuat ke permukaan. Kondisi konflik seperti ini telah dapat dirasakan dan dilihat oleh masyarakat luas. Konflik yang terjadi itu tidak akan muncul tanpa ada penyebab yang melatar belakangnya.

Menurut Mora Dingin, “konflik tapal batas antar nagari di Sumatera Barat memiliki beberapa faktor penyebab, diantaranya : 1) adanya pelaksanaan UU No.5/1957 dan Perda Sumbar No.13/1983 dimana nagari tidak pecah dan kelembagaan adat tetap eksis, kemudian adanya otonomi daerah dilaksanakannya UU No.22/1999 dan kemudian diganti dengan UU No.32/2004, UU No.08/2005 dan Perda Sumbar No. 09/2000 direvisi menjadi Perda No.02/2007 yang mengakibatkan pecahnya nagari lama dan menjadi beberapa nagari yang baru. 2) Adanya nilai ekonomis pada wilayah yang disengketakan. 3) Adanya permainan elite tertentu untuk menguasai suatu wilayah. 4) Adanya perbedaan antara batas

⁵ www.padangekspres.com, diakses 30-08-2011

administrasi pemerintah dengan batas secara adat.⁶ Berdasarkan uraian tersebut faktor penyebab konflik perbatasan nagari di Sumatera Barat secara umum memiliki kesamaan, hanya saja yang membedakannya adalah periodisasi waktu, tempat atau lokasi, dan aktor dari konflik tersebut.

LKAAM telah memaparkan adanya enam nagari yang berkonflik secara manifes, salah satunya adalah Nagari Saniang Baka dan Muaro Pingai. Kedua nagari tersebut merupakan bagian dari daerah Kabupaten Solok. Nagari itu terletak di pinggiran Danau Singkarak dan saling bersebelahan. Kedua nagari ini memiliki sumber daya alam yang banyak dan dapat diberdayakan seperti: hutan, pertanian, perladangan, dan perairan yang berada di danau.

Sebelum terjadinya konflik Nagari Saniang Baka dan Muaro Pingai hidup dalam situasi yang penuh keramahan. Kedua nagari tersebut tidak ada perselisihan. Kedamaian begitu terasa antara kedua nagari tersebut, akan tetapi pada tahun 1970-an kedamaian itu mulai terusik. Hal ini disebabkan oleh mahalnnya harga cengkeh sehingga masyarakat berlomba-lomba membuka hutan. Hutan yang dibuka itu kemudian akan ditanami cengkeh, pohon jati, dan coklat. Pada usaha pembukaan lahan itulah mulai muncul konflik secara laten.

Pada saat itu yang terjadi hanya munculnya ucapan-ucapan dalam masyarakat Saniang Baka. Ucapan-ucapan itu mengatakan bahwa wilayah perbatasan yang dikelola oleh masyarakat Muaro Pingai merupakan bagian nagari mereka. Kondisi seperti ini kemudian menyebabkan adanya konflik laten antara dua komunitas tersebut. Konflik itupun kemudian perlahan muncul kepermukaan

⁶ Wawancara dengan Mora Dingin tanggal 03 september 2013 di kantor Q-Bar

seingga menjadi konflik manifes. Kemudian konflik ini berlanjut hingga saat sekarang belum ada proses penyelesaian yang membawa pada arah perdamaian.

penelitian yang dilakukan Mora Dingin⁷ tentang Konflik Tapal Batas Antara Komunitas Sumpur dengan Komunitas Bungo Tanjung Kabupaten Tanah Datar. Penelitian menjelaskan bahwa konflik yang terjadi antar komunitas di Nagari disebabkan perebutan lahan yang bernilai ekonomi. Dimana pada lahan yang dipersengketakan terdapat sumber daya alam yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Penelitian yang dilakukan oleh RADIUS berjudul Konflik Di Tapal Batas Propinsi Sumatera Barat Dan Propinsi Bengkulu : *Studi Kasus* tuntutan Masyarakat Nagari Silaut juga membahas tentang konflik tapal batas⁸. Pada penelitian ini RADIUS mengungkapkan bahwa ada tiga hal yang menyebabkan munculnya konflik, yaitu: perbedaan pedoman tapal batas, tanah bernilai ekonomi, dan terdapatnya makelar tanah. Adapun fokus penelitian ini adalah mengungkapkan mengapa kesepakatan yang telah dibuat tidak dijalankan. Tidak jalannya kesepakatan tersebut disebabkan oleh status quo yang merugikan masyarakat, tuntutan kepastian status dan administrasi tanah.

Penelitian lain yang sama-sama melakukan penelitian di Saniang Baka dan Muaro Pingai yaitu penelitian Novia Roza⁹. Penelitian ini menjelaskan bahwa penyebab adanya pertentangan di Saniang Baka dan Muaro Pingai yaitu: adanya kepentingan ekonomi kedua nagari dan mempertahankan keutuhan

⁷Dingin, Mora. 2010. Konflik Tapal Batas Antara Komunitas Sumpur dengan Komunitas Bungo Tanjung, Kabupaten Tanah Datar. *Skripsi FISIP Universitas Andalas*.

⁸ RADIUS. 2013. Konflik Di Tapal Batas Propinsi Sumatera Barat Dan Propinsi Bengkulu : *Studi Kasus* tuntutan Masyarakat Nagari Silaut. *Skripsi FIS UNP*

⁹ Roza, Novia. 2011. *Penyebab Konflik Antara Komunitas Saniang Baka dengan Muaro Pingai Kabupaten Solok*. *Skripsi FISIP Universitas Andalas*

wilayah nagari. Sedangkan, penyebab dari terjadinya konflik yaitu: ketidak sepakatan masyarakat dalam menentukan batas ulayat nagari, ketidak pahaman masyarakat tentang pengertian batas administrasi pemerintahan dan batas ulayat, lalu adanya kesulitan dari pihak kepolisian untuk mengusut persoalan pengrusakan.

Pada penelitian ini, peneliti akan mengkaji periodesasi konflik antara Nagari Saniang Baka dan Nagari Muaro Pingai, serta bagaimana situasi konflik dan situasi sosial pada masing-masing periodesasi konflik tersebut. Hal tersebutlah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Periodesasi Konflik Tapal Batas antara Nagari Saniang dan Nagari Muaro Pingai Kabupaten Solok, Sumatera Barat”.

2. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, konflik yang terjadi di Saniang Baka dan Muaro Pingai telah ada sejak tahun 1975 sampai saat sekarang masih belum selesai. Pada tahun 1975 konflik berkisar hanya konflik pribadi, namun pada tahun 2003 konflik meningkat menjadi konflik antar nagari yang berujung pada tindakan kekerasan yang menyebabkan meninggalnya seorang warga Muaro Pingai. Adapun konflik yang terjadi tahun 2008 jauh lebih meningkat, dimana telah terjadi aksi pembakaran 16 rumah warga sipil di Nagari Muaro Pingai.

Dari tahun 2009 sampai saat sekarang konflik di daerah ini masih ada. Namun, konflik kali ini tidak dalam bentuk tindakan kekerasan. Konflik hanya berbentuk pertikaian terhadap patok batas. Pertikaian tersebut terlihat pada perbedaan sikap dalam menanggapi hasil keputusan pemerintah terhadap patok batas yaitu satu pihak menerima keputusan dan pihak lain menolak.

Fokus dari penelitian ini yaitu mengkaji periodesasi konflik tapal batas antara nagari saniang dan nagari muaro pingai kabupaten solok, Sumatera Barat Berdasarkan hal tersebut dirumuskan pertanyaan penelitian (*research questions*):

Bagaimana proses periodesasi konflik tapal batas antara Saniang Baka dan Muaro Pingai Kabupaten Solok, Sumatera Barat?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kehidupan masyarakat nagari Saniang Baka dan Muaro Pingai pada masa periodesasi konflik tapal batas tersebut.

4. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, untuk membahas khasanah kajian sosiologi hukum dan sosiologi pedesaan khususnya tentang konflik tapal perbatasan di Minangkabau.
2. Secara akademik, sebagai bahan masukan bagi peneliti lainnya yang tertarik meneliti masalah konflik khususnya tentang tapal batas.
3. Secara praktis penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat agar kontroversi terhadap tapal batas nagari dapat mulai mereda. Bagi instansi-instansi terkait agar lebih bijaksana dalam menetapkan patok batas agar tidak muncul lagi pertikaian.

5. Kerangka Teoritis

Manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dengan manusia lainnya. Interaksi yang terjadi selalu diwarnai oleh dua hal, yaitu konflik dan

kerjasama. Dengan demikian konflik adalah bagian dari kehidupan manusia. Konflik juga merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat, sebab setiap masyarakat dalam menjalani kehidupannya pernah disinggahi oleh yang namanya konflik. Konflik tersebut dapat terjadi dalam anggota masyarakat baik itu secara personal maupun kelompok.

Konflik sangat bertolak belakang dengan integrasi. Konflik dapat memicu kekacauan atau perselisihan bahkan bisa berakhir pada tindakan kekerasan. Sedangkan integrasi bertujuan untuk menciptakan kenyamanan atau ketertiban dalam masyarakat. Meskipun demikian antara konflik dan integrasi, ia berjalan sebagai sebuah siklus di dalam masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. Sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik.

Ketika berbicara mengenai konflik, konflik erat kaitannya dengan otoritas. Otoritas yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Gubernur Sumatera Barat, yang terkesan menunda-nunda atau melambat-lambatkan penyelesaian konflik tapal batas antara Nagari Saniang Baka dan Nagari Muaro Pingai yang merupakan bagian wilayah administrasi Kabupaten Solok. Kondisi seperti ini membuat masyarakat di perbatasan bergejolak dan memicu terjadinya konflik di tengah-tengah masyarakat perbatasan. Penyelesaian konflik tapal batas sudah dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Solok mulai dari Kecamatan sampai pada Pemerintahan Nagari, yang menyepakati penetapan daerah status quo di sepanjang perbatasan. Awalnya masyarakat tidak mempermasalahkan penetapan wilayah status quo, dengan harapan permasalahan tapal batas dapat

terselesaikan dan tidak berlalut-larut, namun dengan penetapan wilayah status quo mengakibatkan konflik semakin berlarut-larut dan tidak kunjung terselesaikan.

Kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik yang awalnya bersifat laten (yang belum disadari) oleh masyarakat. Kepentingan pemerintah yang mempunyai otoritas untuk memiliki wilayah yang kaya akan potensi sumber daya alam, hal ini jelas sebagai sumber pemasukan devisa daerah masing-masing pihak yang bersangketa. Konflik yang berkepanjangan dan berdampak buruk bagi masyarakat yang berada di wilayah perbatasan tersebut, membuat kepentingan laten berkembang menjadi manifest (yang telah disadari) oleh masyarakat, sehingga menimbulkan solidaritas antar kelompok masyarakat yang berada di wilayah konflik untuk meminta pemerintah supaya cepat menyelesaikan permasalahan tapal batas tersebut.

Merujuk dari permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini digunakan teori *Protacted Social Conflict* (PSC) untuk menganalisis permasalahan tersebut. Teori ini telah dipublikasikan oleh Edward Azar sejak tahun 1970-an. Teori ini berasumsi bahwa konflik itu merepresentasikan “perjuangan yang berkepanjangan yang seringkali penuh kekerasan oleh kelompok komunal untuk keperluan dasar seperti keamanan, pengakuan dan penerimaan, akses yang adil bagi institusi politik dan partisipasi ekonomi”.¹⁰ Peran pemerintah dapat memuaskan atau mengecewakan kebutuhan dasar masyarakat dan karenanya dapat mencegah atau justru menimbulkan konflik. Konflik yang muncul pada masyarakat dapat

¹⁰ Miall, Hugh. 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Halm 111-113

menimbulkan perjuangan yang berkepanjangan dan dapat berujung pada tindakan kekerasan sebab adanya hak-hak yang terampas.

Edwar Azar dalam teori ini melihat adanya peristiwa konflik yang berlarut-larut dalam suatu masyarakat. Konflik tersebut berlarut-larut bisa disebabkan oleh beberapa aspek, seperti: a) gangguan keamanan, b) pengakuan dan penerimaan terhadap kelompok, c) keadilan di bidang politik dan ekonomi, d) peran pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Keberlarutan konflik tersebut terlihat dalam bentuk tindakan kekerasan atau kontak fisik yang dilakukan oleh pihak bertikai dalam suatu periode konflik.

Pada penelitian ini konflik yang terjadi di Nagari Saniang Baka dan Muaro Pingai telah berlarut-larut dari tahun 1975 sampai sekarang. Konflik pada masyarakat dua nagari ini merupakan bentuk perjuangan yang dilakukan oleh kelompok komunal. Perjuangan tersebut ada karena perbedaan sikap dua komunitas masyarakat tersebut terhadap penetapan patok batas. Perbedaan sikap ditunjukkan dalam bentuk penerimaan dan penolakan terhadap keputusan mengenai patok batas dua wilayah tersebut.

Penerimaan dan penolakan tersebut menimbulkan pertikaian yang kemudian berlanjut dari tahun 1970-an hingga sekarang. Diskriminasi dirasakan juga oleh kelompok yang menolak patok batas tersebut. Penetapan patok batas tersebut bersumber pada dua dasar yang berbeda yaitu, penentuan berdasarkan batas administrasi sangat berbeda dengan batas yang dimiliki oleh kaum adat.

Kondisi konflik yang berlarut-larut tersebut menurut Azar terdapat tiga aspek yang muncul kemudian menjadi sebuah ortodoksi yang berlaku dalam

kajiannya tentang perang (konflik). *Pertama*, adanya kecenderungan untuk memahami konflik melalui dikotomi dari dimensi internal dan eksternal yang agak kaku (perang saudara, pemberontakan, revolusi, kudeta, protes, kerusuhan, dan sebagainya). Dikotomi disini dapat berupa pertikaian yang terjadi antara komunitas Saniang Baka dan Muaro Pingai yang bertetangga. Pertikaian tersebut bisa disebabkan oleh pemberontakan atau protes oleh pihak Muaro Pingai karena penetapan tapal batas yang merugikan pihak mereka.

Kedua, kerangka yang berlaku untuk analisa seringkali didasarkan pada pembagian fungsional aspek dan jenis konflik. Pembagian fungsional aspek dan jenis konflik tersebut dapat dilihat pada perbedaan tingkat analisa terhadap patok batas yang telah ditetapkan. *Ketiga*, ada kecenderungan untuk memfokuskan perhatian pada konflik yang jelas dan konflik dengan kekerasan, seperti konflik yang terjadi di Saniang Baka dan Muaro Pingai. Ketika konflik masih laten sering diabaikan, namun ketika terjadi konflik laten semua menjadi panik dan sulit untuk meredakannya.¹¹

Variabel yang dilihat oleh Azar yang diidentifikasi sebagai prakondisi bagi transformasi terhadap tingkatan intensitas yang tinggi yaitu *pertama*, ada kandungan komunal, yaitu unit analisa yang paling berguna dalam situasi PSC adalah kelompok identitas-rasial, religius, etnis, budaya dan yang lain. *Kedua*, dengan mengikuti analisis penyelesaian konflik lainnya Azar mengidentifikasi perampasan kebutuhan manusia sebagai sumber-sumber dari PSC yang tersembunyi. Keluhan-keluhan yang berasal dari perampasan kebutuhan biasanya diekspresikan secara kolektif. Kegagalan penguasa untuk mengatasi masalah ini

¹¹ Ibid., halm 113.

memperbesar terjadinya konflik sosial yang berlarut-larut. *Ketiga*, dalam dunia dimana negara telah diberi otoritas untuk memerintah dan menggunakan kekuatan bila diperlukan untuk mengatur masyarakat, melindungi warga negara, dan untuk menyediakan barang-barang yang secara kolektif. Kebanyakan negara yang mengalami konflik yang berlarut-larut cenderung dicirikan oleh pemerintahan yang tidak mampu, picik, rapuh, dan otoriter yang gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia.¹²

6. Penjelasan Konsep

1. Konflik

Menurut Simon Frisher konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan.¹³ Dalam hal ini konflik merupakan hubungan yang terjadi antara dua individu atau kelompok. Hubungan itu berupa adanya rasa memiliki sasaran atau tujuan yang tidak sejalan dengan pihak lain. Sehingga, dalam proses komunikasi terciptanya hubungan yang berbeda arah dengan pihak lain. Oleh sebab itu, konflik disebut juga pertentangan terhadap tujuan atau sasaran yang dimiliki oleh individu maupun kelompok.

Prof. Dr. Alo Liliweri dalam bukunya “Prasangka dan Konflik” mengatakan bahwa konflik merupakan bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok.¹⁴ Pertentangan itu melibatkan mereka yang memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai atau kebutuhan. Bentuk

¹² Ibid, halm 113-116

¹³ Fisher, Simon.dkk. 2001. “Mengelola Konflik : Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak”. Indonesia. The British Council. halm 4

¹⁴ Leliweri, Alo. 2005. “Prasangka dan Konflik (Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural”. Yogyakarta. PT. LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta. halm 249

konflik ini yaitu seperti yang terjadi pada Nagari Saniang Baka dan Muaro Pingai. Pada konflik itu terdapat pertentangan berupa perbedaan sikap kedua belah pihak dalam menyikapi konflik tapal batas.

2. Tapal Batas

Tapal batas merupakan sebuah penanda atau patok yang di jadikan tanda atau pembatas yang dapat memisahkan antara dua daerah atau wilayah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2006 mengenai Pedoman Penegasan Batas Daerah, maka yang dimaksud dengan batas daerah atau tapal batas adalah pemisah wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain. Adapun yang dimaksud dengan penegasan batas daerah adalah kegiatan penentuan batas secara pasti di lapangan/di perbatasan.¹⁵ Berdasarkan pengertian tersebut maka konflik dua Nagari tersebut nampak pada proses menentukan titik-titik tertentu sebagai batas daerah di lapangan, serta harus membutuhkan kata sepakat kedua belah pihak.

Tapal batas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tapal batas antara Nagari Saniang Baka dan Muaro Pingai. Adapun tanda tapal batas yang dipahami dan dijadikan pedoman oleh masyarakat Nagari Saniang Baka dan Muaro Pingai, yaitu tanda yang ada di alam seperti adanya aliran sungai yang membelah nagari tersebut. Selanjutnya ada juga tanda yang dibuat oleh pemerintah dari potongan bambu yang kemudian dibuka oleh masyarakat. Hal yang paling penting adalah tanda itu harus jelas dan harus adanya pengakuan dari kedua belah pihak yang berbatasan langsung.

¹⁵ Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah

Penetapan batas daerah secara fisik dan pasti, di lapangan bukanlah merupakan suatu hal yang mudah. Kenyataannya menentukan titik-titik batas fisik dengan mengacu pada undang-undang pembentukan daerah itu sendiri sering menimbulkan permasalahan antara daerah-daerah yang bersangkutan karena masing-masing pihak tidak dengan mudah untuk sepakat begitu saja mengenai letak titik-titik batas fisik yang ditentukan.

3. Sikap

Sikap merupakan sesuatu yang dipelajari serta dapat menentukan reaksi dari individu terhadap situasi yang dihadapi.¹⁶ Reaksi individu itu dapat terwujud melalui proses interaksi. Pada interaksi ini terdapat respon bagi individu yang berinteraksi. Respon inilah yang kemudian melahirkan suatu sikap. Sikap itu dapat dilihat pada respon seseorang melalui mimik wajah maupun bahasa tubuh.

Sikap tersebut dapat terwujud dalam bermacam-macam cara berikut: *pertama*, melalui pengalaman yang berulang-ulang. *Kedua*, melalui proses imitasi baik disengaja maupun tidak disengaja. *Ketiga*, melalui sugesti yang diperoleh dari orang lain. *Keempat*, melalui proses identifikasi terhadap seseorang. Beberapa poin itu merupakan bentuk-bentuk dari sikap yang dilakukan oleh manusia.

Thurstone (1928) mengemukakan bahwa sikap merupakan penguatan pengaruh positif atau negatif terhadap objek yang bersifat psikologis.¹⁷ Thurstone menginterpretasikan sikap manusia, mulai dari perasaan atau perilaku yang paling menyenangkan hingga yang paling tidak menyenangkan. Interpretasi itu ditujukan pada sebuah objek psikologis.

¹⁶ Slameto. 2010. "Belajar & Faktor-faktor yang Mempengaruhi". Jakarta. PT. Rineka Cipta. halm 188

¹⁷

Pada temuan lapangan oleh peneliti ditemukan dua bentuk sikap masyarakat yang bertikai. Kedua bentuk sikap itu adalah adanya perasaan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Perasaan yang menyenangkan itu dapat terwujud dari tindakan masyarakat Saniang Baka terhadap keputusan-keputusan konflik. Pada hal ini tindakan tersebut berupa penerimaan terhadap keputusan yang ada.

Berbeda dengan pihak Saniang Baka, pihak Muaro Pingai memperlihatkan sikap tidak menyenangkan. Sikap ini terwujud pada tindakan masyarakat Muaro Pingai terhadap hasil keputusan yang ada. Adapun tindakan itu berupa penolakan terhadap hasil keputusan tersebut.

4. Nagari

Nagari merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup dalam wilayah kesatuan Minangkabau yang mempunyai batasan-batasan wilayah yang jelas, dibawah pimpinan penghulu, mempunyai aturan-aturan tersendiri serta menjalankan pengurusan berdasarkan musyawarah mufakat.¹⁸ Nagari sebagai unit teritorial pada saat yang sama juga merupakan unit politik para penghulu di setiap nagari dengan kelembagaannya yang bernaung di bawah Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) atau sering dikenal dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Pada awal adanya nagari di Minangkabau, nagari itu telah mempunyai *Limbago* atau Lembaga sebagai institusi yang mengatur kehidupan masyarakat nagari dalam bidang adat, budaya, hukum, ekonomi, pertanian, sosial, pemerintahan, dan agama. Limbago itu disebut dengan Tungku Tigo Sajaringan yang terdiri dari Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Cerdik Pandai.

¹⁸ Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari

Secara histories pemerintahan nagari merupakan sebuah pemerintahan tradisional yang diperintah oleh penghulu-penghulu suku yang memiliki kewenangan yang sama derajatnya yang tergabung dalam sebuah kerapatan adat.¹⁹ Sistem Pemerintahan Nagari di wilayah Minangkabau diyakini telah diterapkan jauh sebelum berdirinya kerajaan Pagaruyung. Tetapi semuanya itu berubah semenjak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang pemerintahan Desa yang telah menyeragamkan sistem pemerintahan terendah di seluruh Indonesia.

7. Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terdapat di daerah Nagari Saniang Baka dan Nagari Muaro Pingai yang terletak di Kecamatan X Koto di Atas dan Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Penulis mengambil lokasi penelitian di sini karena terdapat sebuah keunikan realitas yang terjadi di kedua nagari ini yaitu berupa konflik yang berulang-ulang dari tahun 1970-an sampai saat sekarang belum selesai. Konflik yang terjadi antara kedua nagari ini sempat menjadi isu nasional, sebab banyak media massa nasional mleiput peristiwa tersebut.

Keindahan alam yang terdapat di kedua nagari tersebut membuat kenyamanan peneliti melakukan perjalanan penelitian. Kenyamanan penelitian itu hanya dirasakan peneliti saat berjalan di jalan utama masuk kedua nagari tersebut. Saat peneliti menuju ke lokasi penelitian untuk bertemu dengan informan, peneliti sering melewati jalan yang bergelombang, mendaki, jalan yang belum beraspal

¹⁹ Ibid,

dan di satu sisi jalan juga terdapat jurang, serta jalan tersebut merupakan satu-satunya jalan menuju ke lokasi penelitian yang berada di atas bukit.

Lokasi penelitian yang terjal dan menantang tersebut membuat peneliti mengalami kesulitan untuk mencapai lokasi. Lokasi yang sulit di lalui tersebut adalah Jorong Aia Angek, sebab jalannya masih jalan setapak yang dapat dilalui motor atau mobil dengan jenis tertentu. Di jalan tersebut juga tidak bisa kendaraan seperti mobil berselisih, sebab kondisi jalan yang sangat sempit. Selain jorong tersebut, lokasi yang juga bisa dikategorikan terjal adalah lokasi Kantor Wali Nagari Muaro Pingai. Kantor tersebut sangat sulit dilewati oleh motor, sebab jalannya berbatu-batu dan masih jalan tanah merah. Motor jika melalui jalan tersebut harus hati-hati, sebab jalannya sangat licin jika hujan.

Kondisi jalan yang terjal tidak selalu dilalui oleh peneliti, sebab itu hanya sebagian lokasi penelitian yang memiliki akses jalan seperti itu. Akses jalan di lokasi penelitian yang lainnya telah beraspal, sehingga peneliti pun nyaman dalam melakukan penelitian.

b. Pendekatan dan Tipe Penelitian

1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Kualitatif menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Moleong yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang terlibat, di dalam konflik tapal batas di nagari Saniang Baka dan Muaro Pingai.²⁰

²⁰ Moleong, Lexy. J. 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosda Karya. Halm 4

Adapun alasan peneliti mengambil pendekatan ini untuk menemukan defenisi situasi gejala sosial dari subjek. Defenisi tersebut meliputi perilaku, perasaan dan emosi terhadap subjek memandang dan menginterpretasikan kehidupan, karena berhubungan dengan subjek dan dunianya yang tidak wajar yang diciptakan oleh peneliti. Pendekatan ini dapat membantu peneliti dalam mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengalami konflik tersebut, sebab pada pendekatan ini peneliti langsung berhadapan dengan masyarakat yang mengalami konflik tersebut.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus instrumental yaitu kajian atas kasus khusus untuk memperoleh wawasan atas suatu isu, karena penelitian dalam kajian ini khusus tentang kasus konflik untuk mengetahui konflik tapal batas antara nagari Saniang Baka dan Muaro Pingai dan melihat proses sosial yang terjadi pada konflik tersebut.²¹

3. Informan Penelitian

Untuk mendapatkan data penelitian dibutuhkan informan, adapun pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, maksudnya peneliti dengan sengaja menentukan siapa akan menjadi informan sesuai dengan data yang diinginkan tujuan penelitian. Kriteria informan dalam penelitian ini yaitu

1. Masyarakat yang terlibat langsung dengan konflik tapal batas antar Saniang Baka dan Muaro Pingai. Masyarakat yang terlibat atau mengalami langsung kondisi konflik tersebut tidak keseluruhan juga

²¹ Sitorus, Felix MT. 1998. *Penelitian Kualitatif; Suatu Perkenalan*. Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu Sosial IPB. Halm 25

menjadi informan. Informan pada kriteria ini juga dibagi beberapa kategori seperti tokoh masyarakat, pejabat nagari, masyarakat yang mengetahui konflik.

2. Masyarakat yang mengetahui tentang konflik tapal batas tersebut, namun tidak terlibat langsung dengan konflik. Informan yang tidak terlibat langsung tokoh masyarakat nagari tetangga seperti niniak mamak Nagari Paninggahan, pejabat pemerintahan (pejabat kecamatan, pejabat BPN Kabupaten Solok, dan Anggota DPRD Kabupaten Solok).

Kriteria diatas mengelompokan informan berdasarkan keterlibatan langsung dan tidak langsung dengan situasi konflik. Kriteria tersebut telah membantu peneliti dalam memperoleh informasi penngenanai penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada masing-masing lokasi. Informan penelitian yang telah diwawancarai berjumlah 20 orang. Informan yang 20 orang tersebut tersebar ke dalam beberapa kriteria di atas dan informan dari masing-masing nagari tidak diambil secara merata.

c. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data mulai dilakukan sebelum dan setelah seminar proposal sampai surat izin penelitian. Data yang dikumpulkan tersebut berupa data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumbernya dengan cara observasi dan wawancara terhadap informan di lokasi penelitian. Data sekunder diperoleh melalui literatur atau studi dokumentasi yang diperoleh dari kantor Wali Nagari, KAN, dan instansi Pemerintahan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun penjelasan dari teknik tersebut yaitu:

1. Teknik Observasi

Observasi/pengamatan adalah salah satu aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung di lapangan. Dalam observasi peneliti melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung. Objek yang diamati dalam observasi adalah pelaku, peristiwa dan *setting* (waktu dan tempat) dari yang ingin diteliti. Observasi dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data dengan cara mengamati langsung tentang kehidupan sosial pasca resolusi konflik antara masyarakat Nagari Saniang Baka dan Nagari Muaro Pingai Kabupaten Solok. Data yang diperoleh dari hasil observasi akan menunjukkan kenyataan yang sebenarnya terjadi.

Teknik observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi terbatas. Teknik ini dipilih karena dapat memberikan gambaran yang konkret mengenai kehidupan sosial masyarakat pasca resolusi konflik antara warga Nagari Saniang Baka dan Nagari Muaro Pingai Kabupaten Solok.

Pada saat dilakukan observasi di lapangan terdapat beberapa kendala yang dilalui oleh penulis, diantaranya: *pertama*, kesulitan untuk bertemu dengan informan. Kesulitan bertemu dengan informan tersebut sangat dirasakan oleh peneliti saat awal penelitian dimulai. Penelitian dimulai awal bulan Agustus, saat itu peneliti telah membuat janji dengan salah satu informan, akan tetapi beliau bersedia bertemu satu bulan setelah janji dibuat. *Kedua*, adanya rasa tidak nyaman

oleh informan saat peneliti melakukan observasi. Hal tersebut tergambar dari ekspresi wajahnya yang gelisah saat peneliti melontarkan pertanyaan. *Ketiga*, penolakan yang dilakukan informan saat peneliti hendak melakukan observasi. Penolakan tersebut tidak secara kasar, namun mereka menolak dengan halus. Saat peneliti hendak melakukan observasi tersebut, penolakan ditunjukkan hanya dengan alasan mereka takut untuk membahas konflik dan ada juga yang trauma dengan kejadian tersebut. *Keempat*, kondisi alam yang terjal dan menantang membuat peneliti mengalami kesulitan untuk mencapai lokasi. Lokasi yang sulit di lalui tersebut adalah Jorong Aia Angek, sebab jalannya masih jalan setapak yang dapat dilalui motor atau mobil dengan jenis tertentu. Di jalan tersebut juga tidak bisa kendaraan seperti mobil berselisih, sebab kondisi jalan yang sangat sempit. Selain jorong tersebut, lokasi yang juga bisa dikategorikan terjal adalah lokasi Kantor Wali Nagari Muaro Pingai. Kantor tersebut sangat sulit dilewati oleh motor, sebab jalannya berbatu-batu dan masih jalan tanah merah. Motor jika melalui jalan tersebut harus hati-hati, sebab jalannya sangat licin jika hujan.

Selain kendala yang dialami oleh peneliti saat observasi, juga terdapat kemudahan yang dialami peneliti. Kemudahan tersebut seperti: a) keramahan informan ketika menerima peneliti dalam melakukan observasi. Keramahan tersebut terwujud pada sambutan hangat oleh informan pada peneliti saat pertama datang dan melakukan wawancara. b) keterbukaan informan dalam menjelaskan kronologis konflik. Keterbukaan tersebut ditunjukkan oleh informan dengan memberikan beberapa file data yang berkaitan dengan konflik. Data tersebut berupa surat keputusan, absensi rapat musyawarah penyelesaian konflik, peta wilayah, dan peta topografi.

2. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang otoritas (seorang ahli atau yang berwenang dalam suatu masalah). Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya disiapkan terlebih dahulu yang diarahkan kepada informasi-informasi untuk topik yang akan dibahas.²²

Bentuk wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung/ bebas dan mendalam (*in-dept interview*) melalui pertanyaan yang sifatnya tidak terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan kepada beberapa orang informan yang telah ditetapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang dikembangkan dari pedoman wawancara yang dibuat sebelum ke lapangan. Jawaban dari informan akan diikuti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pendalaman, sehingga diperoleh informasi sedetail mungkin dari para informan.

Penelitian di lapangan menggunakan alat atau instrument berupa pedoman wawancara yang sudah dipersiapkan sebelum wawancara di lokasi penelitian. Teknik wawancara ini menggunakan alat berupa catatan lapangan guna mempermudah penulis dalam penelitian. Hasil wawancara ada yang dicatat kemudian dari catatan lapangan tersebut dibuat interaktif dan analisisnya.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimulai dari bulan Agustus sampai bulan Desember tahun 2020. Penelitian awalnya di mulai dari Nagari Saniang Baka kemudian baru ke Nagari Muaro Pingai. Pada saat penelitian, peneliti melakukan wawancara bersama informan di masing-masing nagari.

²² Keraf, Gorys. 1970. *Komposisi*. Jakarta: Nusa Indah. Halm 161

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama informan terjadi dalam beberapa kondisi. Kondisi tersebut berupa waktu wawancara yang beragam, seperti ada yang pagi yaitu sekitar pukul 08.00 sampai selesai, ada pada siang hari yaitu pukul 13.00 sampai selesai, ada pada sore hari yaitu pukul 16.00 sampai selesai, bahkan ada yang malam yaitu sekitar jam 20.00 sampai 21.00.

Wawancara yang peneliti lakukan tidak hanya berpusat pada satu tempat saja. Wawancara tersebut ada yang peneliti lakukan di rumah informan. Saat wawancara yang dilakukan di rumah informan suasana terasa santai, sehingga penelitipun merasa nyaman dalam melakukan wawancara. Selain di rumah informan wawancara juga dilakukan di kantor, seperti kantor Wali Nagari, kantor BPN Kabupaten Solok, dan Kecamatan. Kemudian, wawancara juga dilakukan oleh peneliti di warung bersama informan. Wawancara di warung ini dilakukan karena informan adalah pemilik warung tersebut. Wawancara juga ada dilakukan oleh informan bersama pemilik bengkel, dan wawancaranyapun terjadi di bengkel tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dilakukan dengan mempelajari beberapa arsip-arsip terkait dengan mediasi konflik antara warga Nagari Saniang Baka dan Nagari Muara Pingai di Kabupaten Solok. Melalui teknik ini dapat menghimpun berbagai informasi dari bahan-bahan dokumentasi seperti surat kesepakatan damai yang merupakan resolusi konflik antara kedua nagari atau data dari koran yang ada gambar waktu terjadinya konflik.

Teknik tersebut dilakukan pada saat survey awal sebelum seminar proposal sampai saat penelitian. Namun sebelum melakukan observasi peneliti

terlebih dahulu meminta izin kepada Kepala Wali Nagari dengan membawa surat rekomendasi dari Sekretariat Daerah Kabupaten Solok di Aro Suka untuk melakukan penelitian.

d. Validitas Data

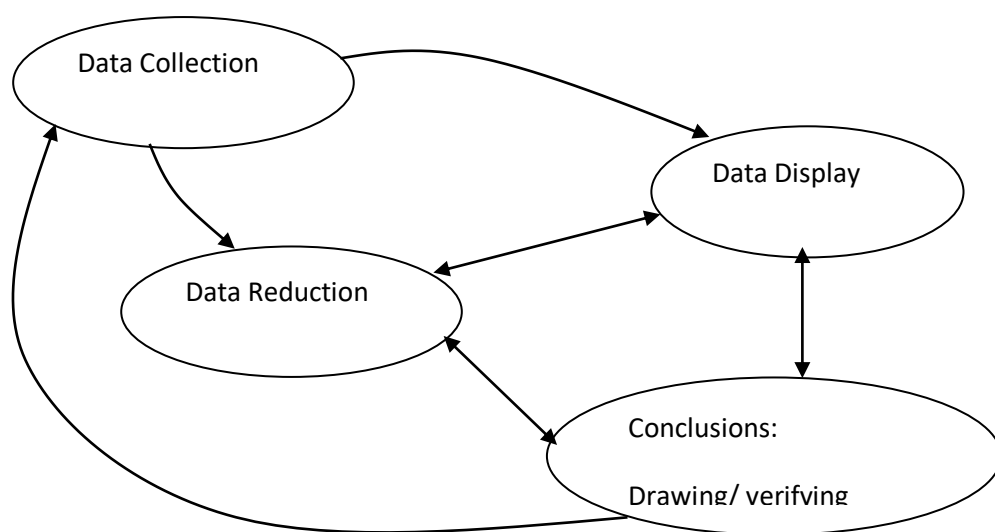
Untuk mendapatkan data yang valid, maka dilakukan teknik triangulasi data, yaitu dengan cara mengkombinasikan sumber data dan metodologi penelitian. Artinya dalam mencari data di lapangan penulis menggunakan pertanyaan yang sama yang diajukan kepada beberapa orang informan yang berbeda, dan mengkombinasikan data hasil wawancara dengan data hasil observasi.

e. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis terus menerus sepanjang penelitian. Analisis data menggunakan model *interactive analysis* seperti yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yakni melalui tahap-tahap reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Abstraksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah membuat rangkuman data-data hasil penelitian terhadap proses konflik antara masyarakat Nagari Saniang Baka dan Muaro Pingai mengenai tapal batas nagari tersebut yang menyangkut pertanyaan-pertanyaan yang perlu dalam penelitian dengan menyusun dalam satuan-satuan dengan memberikan kategori pada tiap-tiap pertanyaan reduksi data berlangsung secara terus menerus selama penelitian.

Display data atau penyajian data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyajian sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan terhadap masalah penelitian. Penarikan kesimpulan/verifikasi diperoleh berdasarkan informasi yang diperoleh dilapangan atau melakukan interpretasi data, sehingga dapat memberikan dengan jelas dan akurat tentang konflik antara masyarakat dua nagari tersebut.

Ketiga langkah-langkah di atas merupakan suatu proses siklus dan interaktif. Peneliti bergerak diantara empat “sumbu” kumparan tersebut. Sebagaimana yang tergambar di bawah ini:



Gambar. 1 Skema analisis data kualitatif model interaktif Miles dan Hubermans

BAB II

NAGARI SANIANG BAKA DAN NAGARI MUARO PINGAI

A. Nagari Saniang Baka

1. Letak dan Keadaan Geografis

Nagari Saniang Baka memiliki luas wilayah 18.000 Ha. Nagari tersebut berada di Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok. Secara administrasi wilayah ini memiliki batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Danau Singkarak
- Sebelah selatan berbatasan dengan Rimbo atau Kota Padang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Sumani dan Koto Sani
- Sebelah Barat berbatasan dengan Muaro Pingai dan Paninggahan

Luas nagari ini terdiri atas tanah sawah, tanah kering, tanah basah, tanah perkebunan rakyat dan tanah fasilitas umum. Untuk perkebunan rakyat dan kehutanan seluas 6755 Ha sekitar 37,52 % dari luas nagari. Pemanfaatan tanah tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat setempat.

Untuk menuju nagari ini tidaklah sulit, sebab tersedia sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Jalan raya yang menghubungkan daerah ini dengan daerah luar sudah merupakan jalan beraspal, sehingga dapat dilalui dengan kendaraan roda dua atau kendaraan roda empat. Adapun akses masuk nagari ini melalui Pasar Sumani. Adapun jarak Nagari Saniang Baka dengan Kota Solok adalah 24 km dan menghabiskan waktu perjalanan selama 30 menit. Jarak yang harus ditempuh jika dari ibukota kabupaten Solok, Arosuka adalah 50 km dengan

lama perjalanan 1 jam, sedangkan jarak dengan ibukota provinsi adalah 87 km dengan lama perjalanan 2 jam.

Angkutan umum yang tersedia dari pusat ibukota provinsi adalah berupa bus angkutan antar kota dalam provinsi yang beroperasi dari jam 5 subuh sampai jam 7 malam dengan tarif Rp. 13.000,- atau dengan menggunakan jasa travel yang langsung sampai ke alamat dengan tarif Rp. 40.000,- . bus dari ibukota provinsi berhenti hanya di terminal Bareh Solok yang berada di Kota Solok, agar sampai ke Saniang Baka maka harus menyambung lagi naik angkutan umum roda empat jurusan Kota Solok – Saniang Baka dengan tarif Rp 5000,- dan angkutan ini biasanya beroperasi dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore.

2. Pemerintahan

Pada pemerintahan Nagari Saniang Baka terdapat dua lembaga yang berperan yaitu Wali Nagari dan Badan Musyawarah Nagari (BMN). Wali Nagari diangkat berdasarkan perolehan suara, dimana calon Wali Nagari yang mendapat suara terbanyak dari masyarakat itulah yang dijadikan sebagai Wali Nagari. Setelah itu Wali Nagari yang terpilih dilantik oleh BMN. BMN merupakan aparaturnya pemerintahan yang berada dalam nagari dengan strukturnya ditunjuk berdasarkan utusan masing-masing jorong.

Wali Nagari dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan pemerintahan dalam nagari dibantu oleh beberapa orang perangkat atau staf termasuk Wali Jorong. Struktur yang terdapat dalam nagari yaitu: Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Seksi Pemerintahan, Seksi Ekbang, Seksi Kesra-Sosbud, dan Wali Jorong. Pemilihan Wali Jorong ditunjuk langsung oleh Wali Nagari. Dalam menjalankan tugasnya perangkat-perangkat tersebut bertanggung jawab

sepenuhnya kepada Wali Nagari. Selain struktur tersebut juga terdapat BMN atau Badan Musyawarah Nagari yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dalam nagari, sedangkan Wali Nagari berfungsi sebagai lembaga eksekutif.

Dalam pemerintahan Saniang Baka, selain terdapat Wali Nagari dan BMN juga terdapat Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dalam menjalankan fungsinya KAN lebih fokus pada masalah yang berhubungan dengan adat istiadat yang terdapat dalam nagari. Anggota KAN terdairi dari ninik mamak yang berasal dari beberapa suku yang ada di nagari. Nagari Saniang Baka terdiri dari enam jorong yaitu Jorong Aie Angek, Jorong Balai Lalang, Jorong Balai Panjang, Jorong Balai Gadang, Jorong Kapalo Labuah, dan Jorong Balai Batingkah.

3. Penduduk, pendidikan dan mata pencarian

a. Penduduk

Jumlah penduduk Saniang Baka adalah 5485 jiwa. Terdiri dari 2619 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2866 jiwa berjenis kelamin perempuan. Warga Nagari Saniang Baka terdiri dari 1377 kepala keluarga. Penyebaran penduduk Nagari Saniang Baka dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Penyebaran Penduduk Berdasarkan Jorong di Nagari Saniang Baka

No	Nama jorong	KK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Aia angek	49	98	91	189
2.	Bl. Batingkah	242	535	540	1075
3.	Bl. Lalang	212	420	464	884
4.	Bl. Panjang	296	468	611	1079
5.	Bl. Gadang	231	442	473	915
6.	Kapalo labuh	347	656	687	1343
Jumlah			2619	2866	5485

Sumber: Profil Nagari Saniang Baka Tahun 2013

Tabel diatas melihatkan persebaran penduduk yang terdapat dalam Nagari Saniang Baka. Penyebaran penduduk di setiap jorong di Nagari Saniang Baka tidak merata. Hal tersebut terlihat dari jorong yang paling banyak jumlah penduduknya adalah Jorong Kapalo Labuh berjumlah 1343 jiwa, kemudian Jorong Balai Panjang dengan jumlah 1079 jiwa, Jorong Balai Batingkah dengan 1075 jiwa, Jorong Balai Gadang 915 jiwa, Jorong Balai Lalang dengan 884 jiwa dan yang paling kecil jumlah penduduknya yaitu Jorong Aie Angek dengan 189 jiwa.

b. Pendidikan

Di Nagari Saniang Baka secara umum pendidikan sudah cukup baik, karena pemerintah telah menyediakan sarana pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendidikan tersebut merupakan faktor utama dalam meningkatkan taraf pendidikan penduduk. Berdasarkan data yang di dapatkan dari profil nagari, tingkat pendidikan masyarakat dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan Pendidikan Masyarakat Saniang Baka

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1.	Buta aksara	19 orang
2.	Tidak tamat SD	1126 orang
3.	Tamat Sekolah Dasar (SD)	1277 orang
4.	SLTP/Sederajat	1348 orang
5.	SLTA/Sederajat	755 orang
6.	D1 s/d D3	90 orang
7.	S1	70 orang
8.	S2	2 orang

Sumber : Profil Nagari Saniang Baka 2013

Bila di lihat dari tabel di atas jumlah masyarakat yang jenjang pendidikannya paling banyak adalah tamat SLTP 1348 orang, kemudian tamat SD 1277, tidak tamat SD 1126, tamat SLTA 755, D1 sampai D3 sebanyak 90 orang, S1 sebanyak 70 orang, dan S2 sebanyak 2 orang. Hal ini berarti mutu pendidikan di Saniang Baka masih memprihatinkan dan dapat digolongkan tingkat pendidikan masyarakat di nagari ini masih rendah. Hal tersebut disebabkan karena kemauan masyarakatnya yang rendah terhadap pendidikan.

Selain data pada tabel di atas, pendidikan masyarakat Saniang Baka dapat dilihat juga berdasarkan sarana pendidikan yang terdapat pada nagari tersebut. Adapun sarana pendidikan yang ada dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.2 Jumlah Sarana Pendidikan di Nagari Saniang Baka

NO	SARANA	JUMLAH	
		2009	2010
1	Taman Kanak – Kanak	1	2
2	Sekolah Dasar	7	7
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	2	2
4	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	2	2
6	M I S		
7	M D A	5	5
8	Kursus	1	1

Sumber: Profil Nagari Saniang Baka tahun 2013

Tabel di atas menunjukkan bahwa sarana pendidikan di Nagari Saniang Baka masih minim sekali. Hal tersebut jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Saniang Baka yang berjumlah 5485, maka sarana pendidikan tersebut tidak akan mampu menampung kuota penduduk untuk mengecam pendidikan.

c. Mata Pencarian

Dari profil nagari yang didapatkan bahwa masyarakat Saniang Baka mayoritas bermata pencarian sebagai petani. Jumlah anggota masyarakat yang semakin bertambah dan padat serta kemajuan zaman yang semakin menghargai

adanya uang dan kebutuhan hidup yang semakin meningkat, maka tidak mungkin bertani sebagai sumber ekonomi atau hidup satu-satunya.

Mata pencarian masyarakat Saniang Baka bervariasi mulai dari petani, buruh tani dan swasta, PNS, pengrajin, pedagang, peternak, nelayan, montir dan tukang bangunan. Pada umumnya masyarakat Saniang Baka memiliki pekerjaan rangkap. Masyarakat di daerah ini tidak hanya menggantungkan hidupnya pada satu pekerjaan saja, maksudnya masyarakat mempunyai mata pencarian yang rangkap. Masyarakat di daerah ini ada yang bekerja sebagai petani, sebagai peternak, serta juga sebagai pengrajin, bahkan bagi PNS juga begitu halnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.3 Mata Pencarian Masyarakat Saniang Baka

No	Jenis pekerjaan	Jumlah Masyarakat berdasarkan jenis pekerjaan
1.	Pertanian	1084 orang
2.	Kehutanan	647 orang
3.	Perkebunan	301 orang
4.	Peternakan	417 orang
5.	Perikanan	112 orang
6.	Perdagangan	319 orang
7.	Sopir	143 orang
8.	Tukang bangunan	93 orang
9.	Tukang jahit	21 orang
10.	Rumah makan	3 orang
11.	Montir	4 orang
12.	Gilingan padi	25 orang
13.	Penginapan	-
14.	Pariwisata / industri home	5 orang
15.	PNS/ Karyawan / Pensiunan	128 orang
16.	Jasa lainnya	-

Sumber : Profil Nagari Saniang Baka, 2013

Tabel di atas memaparkan bahwa mata pencarian yang paling banyak dilakukan oleh penduduk adalah petani yaitu 1084 orang dan bekerja di kehutanan sebanyak 647 orang. Hal ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain

yakni bekerja sebagai pedagang maupun berkebun. Dengan nagari seluas 1800 Ha, maka penggunaan tanah dibagi atas beberapa macam: ada untuk pemukiman, sawah, perkebunan, hutan, tempat dan fasilitas umum lainnya. Untuk lebih jelasnya penggunaan wilayah menurut penggunaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4 Luas Wilayah Menurut Penggunaan

No	Jenis penggunaan tanah	Jumlah (Ha)
1.	Perumahan dan pekarangan	28
2.	Perkantoran	5
3.	Sekolah	7
4.	Rumah ibadah	4
5.	Tanah lapang	2
6.	Tanah perkuburan	6
7.	Jalan	7
8.	Sawah	457
9.	Ladang	58
10.	Perkebunan	450
11.	Kehutanan	6755
12.	Kolam	1
13.	Lahan tidur/ kosong	314
14.	Lahan kritis	10.450

Sumber : Profil Nagari Saniang Baka tahun 2013

4. Kekerabatan

Kelompok kekerabatan yang terdapat di dalam masyarakat Saniang Baka sama dengan bentuk masyarakat Minangkabau lainnya yakni terlihat dalam *paruik* yaitu kesatuan keluarga luas matrilineal. *Paruik* berasal dari kata “perut” atau kandungan ini berarti orang yang dianggap itu berasal dari atau dilahirkan oleh seorang ibu yang sama.

Pemimpin dari *paruik* adalah mamak yang diangkat dari laki-laki tertua dari seluruh anggota *paruik* terhimpun, dikelompokkan dalam sebuah rumah adat yang disebut rumah gadang. Gabungan dari beberapa kaum disebut suku. Suku dikepalai oleh seorang tuo suku yang bergelar *datuak* (penghulu). Antar

warga sepasukuan tidak dibenarkan kawin. Penghulu yang terdapat dalam masyarakat Saniang Baka berjumlah 8 orang yang berasal dari 8 suku yang ada di dalam masyarakat. Kedelapan suku tersebut adalah Suku Koto, Sikumbang, Piliang, Balai Mansiang, Sumpadang, Tanjuang, Guci, dan Pinyangek.

5. Sistem Tenurial

Sistem tenurial adalah sistem penguasaan lahan yang berlandaskan hukum adat. Para anggota adat terikat dengan peraturan dalam sistem kepemilikan dan sistem hak atas sebuah lahan.

Penguasaan dan pengelolaan tanah pada masyarakat Saniang Baka adalah tanah ulayat kaum atau mamak kepala waris kaum. Tanah ulayat merupakan tanah yang dimiliki secara bersama-sama kaum kerabat. Penguasaannya berada di tangan mamak kepala kaum atau laki-laki tertua dalam keluarga sekaum. Keputusan mamak kepala kaum ini sangat menentukan yang alam Minangkabau namakan *mabiang tambuak mancancang patuik* atau yang dapat menembus dan memutuskan segala sesuatunya secara tuntas.

Pada masyarakat Saniang Baka, semua harta benda seperti tanah dan rumah merupakan milik bersama, milik kaum dikerjakan dan dinikmati bersama. Harta benda merupakan milik perempuan sedang pengaturannya dilakukan oleh laki-laki atau mamak yang berfungsi sebagai pimpinan dalam kaumnya. Jadi dapat dikatakan bahwa pola pemilikan tanah bagi masyarakat kaum yang ada di Nagari Saniang Baka juga menekankan kepada kepemilikan bersama (komunal), dimana tanah-tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan anggota kaum.

Penguasaan dan pengelolaan atas tanah yang ada di komunitas saniang baka, dapat dibagi atas beberapa status yaitu:

1. ulayat kaum, ulayat kaum ditentukan untuk pengelolaan hutan oleh kaum dalam satu paruk. Maka, setiap kaum yang ada di Nagari Saniang Baka memiliki tanah bisa dimanfaatkan untuk parak atau kayu yang bisa diambil oleh kaum tersebut untuk kepentingan mereka sendiri.
2. Ulayat nagari, merupakan bagian yang lebih luas dari ulayat kaum adalah ulayat nagari. Ulayat nagari diperuntukan untuk kesejahteraan anak nagari.

B. Nagari Muaro Pingai

1. Letak dan Keadaan Geografis

Nagari Muaro Pingai memiliki luas 3.750 Ha yang terletak pada Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok. Adapun batas administrasi wilayah ini adalah :

- Sebelah utara berbatasan dengan Nagari Paninggahan
- Sebelah selatan dengan Nagari Saniang Baka
- Sebelah timur berbatasan dengan Danau Singkarak
- Sebelah barat berbatasan dengan Kota Padang

Secara geografis Nagari Muaro Pingai terletak pada 0,31 sampai 1, 45 LS dan 100,25 sampai 101,41 BT. Untuk waktu tempuh dari Nagari Muaro Pingai ke ibu kota Provinsi Sumatera Barat membutuhkan waktu selama 2 jam, waktu tempuh ke kabupaten 1 jam dengan menggunakan alat transportasi umum.

Wilayah nagari terdiri dari tanah sawah, tanah kering, tanah basah, tanah perkebunan rakyat, dan tanah fasilitas umum. Dimana penggunaan wilayah

Nagari Muaro Pingai paling banyak digunakan untuk sawah dan tanah perkebunan rakyat yaitu seluas 123 Ha atau sekitar 3,28 % luas nagari.

2. Pemerintahan

Pemerintahan Nagari Muaro Pingai terdapat dua lembaga yang berperan yaitu Wali Nagari dan BMN. Wali Nagari diangkat berdasarkan perolehan suara terbanyak dari masyarakat. Bagi yang memperoleh suara terbanyak itulah yang akan menjadi Wali Nagari. Wali Nagari yang terpilih kemudian dilantik oleh BMN, sedangkan BMN berdasarkan utusan masing-masing jorong.

Untuk memudahkan pekerjaannya Wali Nagari dibantu oleh beberapa orang perangkat atau staf termasuk Wali Jorong yang ditunjuk langsung oleh Wali Nagari. Perangkat atau staf tersebut adalah Sekretaris Nagari, Seksi Pemerintahan, Seksi Ekbang, Seksi Kesra-Sosbud, dan Wali Jorong. Semua perangkat dan staf tersebut dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sepenuhnya kepada Wali Nagari.

Dalam pemerintahan Nagari Muaro Pingai, selain terdapat Wali Nagari dan BMN, juga terdapat Kerapatan Adat Nagari (KAN). KAN memiliki fungsi mengurus masalah yang berhubungan dengan adat istiadat yang terdapat di nagari. Anggota KAN terdiri dari ninik mamak yang berasal dari beberapa suku yang ada di nagari. nagari muaro pingai terdiri dari 5 jorong yaitu Jorong Guci IV, Jorong Koto, Jorong Guci II, Jorong Tanjung, dan Jorong Pinyalai.

3. Penduduk, pendidikan dan mata pencarian

a. Penduduk

Profil nagari tahun 2010 jumlah penduduk nagari muaro pingai adalah 2796 jiwa, yang terdiri dari 1273 jiwa laki-laki dan 1523 jiwa perempuan. Masyarakat Muaro Pingai terdiri dari 593 kepala keluarga. Penduduk Muaro Pingai tersebut tersebar di lima jorong secara tidak merata.

b. Pendidikan

Di Nagari Muaro Pingai secara umum pendidikan sudah cukup baik, karena pemerintah telah mulai memperhatikan pendidikan masyarakatnya. Hal tersebut terbukti dengan adanya disediakan sarana pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meskipun sarana pendidikan tersebut belum terlalu memadai. Sarana pendidikan baru ada mulai dari Sekolah Dasar dan SLTP. Berdasarkan data yang didapatkan dari profil nagari, tingkat pendidikan masyarakat dapat dilihat tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5 Tingkat Pendidikan Masyarakat Nagari Muarao Pingai

No	Tingkat pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Buta aksara	16 orang
2.	Tidak tamat SD	465 orang
3.	Tamat SD	394 orang
4.	SLTP/Sederajat	413 orang
5.	SLTA/Sederajat	375 orang
6.	D1 s/d D3	57 orang
7.	S1	30 orang

Sumber : Profil Nagari Muaro Pingai tahun 2013

Dari tabel di atas, jumlah masyarakat yang jenjang pendidikannya yang paling banyak adalah tidak tamat SD sebanyak 465 orang, buta aksara 16 orang, tamat SD sebanyak 394 orang, SLTP sebanyak 413 orang. Ini membuktikan mutu pendidikan di nagari muaro pingai masih memperhatikan. Hal ini disebabkan

karena kemauan masyarakatnya yang rendah terhadap pendidikan. Kemudian yang berpendidikan SLTA sebanyak 375 orang, Diploma 57 orang dan Sarjana sebanyak 30 orang. Hal ini bila dilihat dari jumlah penduduk Nagari Muaro Pingai, masih dapat digolongkan tingkat pendidikan masyarakat dengan ini masih rendah.

c. Mata Pencarian

Masyarakat Muaro Pingai mayoritas bermata pencarian sebagai petani, tetapi karena jumlah anggota masyarakat yang semakin bertambah dan padat serta kemajuan zaman yang semakin menghargai adanya uang menyebabkan kebutuhan hidup semakin meningkat, maka tidak mungkin bertani sebagai sumber ekonomi atau hidup satu-satunya.

Mata pencarian masyarakat Muaro pingai bervariasi mulai dari petani, buruh tani, pengrajin, pedang, peternak, dan nelayan. Pada umumnya komunitas muaro pingai memiliki pekerjaan rangkap. Masyarakat di daerah ini tidak hanya menggantungkan hidupnya pada satu pekerjaan saja, maksudnya masyarakat mempunyai mata pencarian rangkap. Masyarakat di daerah ini ada yang bekerja sebagai petani, sebagai peternak, juga sebagai pengrajin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2.6 Mata Pencarian Masyarakat Nagari Muaro Pingai

No	Mata Pencarian	Jumlah
1.	Petani / Perkebunan	662 orang
2.	Peternakan	80 orang
3.	Nelayan	85 orang
4.	Pedagang	318 orang
5.	Sopir	79 orang
6.	Pariwisata / Home Industry	37 orang
7.	PNS/ Karyawan / Pensiunan	18 orang
8.	Jasa Lainnya	143 orang

Sumber : Profil Nagari Muaro Pingai 2013

Tabel di atas memaparkan bahwa mata pencarian yang banyak dilakukan oleh penduduk adalah petani yaitu 662 orang. Hal ini menyebabkan masyarakat di nagari ini mencari alternatif lain yakni bekerja sebagai pedagang maupun berkebun.

Nagari yang memiliki luas 3.750 Ha dapat dimanfaatkan untuk digarap, oleh sebab itu penggunaan tanah dibagi atas beberapa macam yaitu ada untuk pemukiman, sawah, perkebunan, hutan, kolam, tempat dan fasilitas umum lainnya.

4. Kekerabatan

Kelompok kekerabatan yang terdapat didalam Nagari Muaro Pingai sama dengan bentuk masyarakat Minangkabau lainnya, yakni terlihat dalam *paruik* . *Paruik* merupakan suatu kesatuan keluarga luas matrilineal. *Paruik* berasal dari kata “perut” atau kandungan yang memiliki makna bahwa orang yang dianggap itu berasal dari atau dilahirkan oleh seorang ibu yang sama.

Pemimpin dari *paruik* adalah mamak yang diangkat dari laki-laki tertua dari seluruh anggota *paruik* terhimpun. Anggota *paruik* tersebut dikelompokkan dalam sebuah rumah adat yang disebut rumah rumah gadang. Lebih besar dari *paruik* adalah kaum, dan gabungan dari beberapa kaum disebut suku. Suku dikepalai oleh seorang tuo suku yang bergelar *datuak* (penghulu). Pada masyarakat Muaro Pingai yang sepasukuan tidak dibenarkan kawin. Penghulu yang terdapat dalam masyarakat muaro pingai berjumlah 4 orang yang berasal dari 4 suku yang ada di dalam masyarakat. Keempat suku tersebut adalah Suku Koto, Suku Tanjung, Suku Guci, dan Suku Pinyalai.

Jika diperhatikan lagi, antara suku-suku yang ada di Nagari Muaro Pingai memiliki kesamaan yakni Suku Koto, Suku Guci, dan Suku Tanjuang. Kenyataan ini semakin menjelaskan bahwa konflik yang ada di kedua nagari tidak menghiraukan adanya ikatan kekerabatan secara adat. Namun yang lebih ditonjolkan adalah “ego nagari” masing-masing. Betapa memprihatinkan kondisi yang terjadi di kedua nagari. Seharusnya konflik dan ketidak sepahaman yang ada di kedua nagari dapat diselesaikan secara adat. Kenyataan ini pun mengartikan mudurnya hubungan secara adat yang ada di kedua nagari.

5. Sistem Tenurial

Sistem penguasaan tanah pada masyarakat Muaro Pingai adalah tanah ulayat kaum yang dipegang oleh kaum atau mamak kepala waris kaum. Tanah ulayat merupakan tanah yang dimiliki secara bersama-sama kaum tersebut. Penguasaannya berada ditangan mamak kepala kaum atau laki-laki tertua dalam keluarga sekaum. Keputusan mamak kepala kaum ini sangat menentukan yang alam miangkabau dinamakan *mambiang tambuak mancancang putuih* atau yang dapat menmbus dan memutuskan segala sesuatunya secara tuntas.

Dalam Nagari Muaro Pingai, semua harta benda seperti tanah dan rumah merupakan milik bersama, milik kaum dikerjakan dan dinimati bersama. Harta benda merupakan milik perempuan sedangkan pengaturannya dilakukan oleh laki-laki atau mamak yang berfungsi sebagai pimpinan dalam kaumnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa pola pemilikan tanah bagi masyarakat kaum yang ada di Nagari Muaro Pingai juga menekankan kepada kepemilikan bersama (komunal) dan tanah-tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan anggota kaum.

Penguasaan dan pengelolaan atas tanah yang ada pada masyarakat Muaro Pingai, dapat dibagi atas beberapa status yaitu:

1. pusako tinggi, dikuasai oleh satu *paruik* (keluarga inti dalam satu keturunan ibu) dan dikepalai oleh seorang mamak *kapalo* waris. Mamak *kapalo* waris mengatur hal-hal yang berhubungan dengan *pusako tinggi* bagi anak kemenakannya.
2. Ulayat kaum, ulayat kaum yang ada di Nagari Muaro Pingai memiliki tanah bisa dimanfaatkan untuk parak atau kayu yang bisa diambil oleh kaum tersebut untuk kepentingan mereka sendiri.
3. Ulayat suku, ulayat suku merupakan pembagian kawasan hutan untuk dimanfaatkan oleh seluruh suku. Masing-masing suku mempunyai ulayat sendiri. Didalam ulayat suku masyarakat bisa memanfaatkan untuk parak atau ladang.
4. Ulayat nagari, bagian yang lebih luas dari ulayat kaum, ulaya suku adalah ulayat nagari. ulayat nagari diperuntukan untuk kesejahteraan anak nagari.

BAB III

Periodesasi Konflik Tapal Batas antara Nagari Saniang Baka dan Muaro Pingai Kabupaten Solok Sumatera Barat

Pada bab ini akan diuraikan hasil temuan lapangan tentang periodesasi konflik tapal batas antara Nagari Saniang Baka dan Muaro Pingai. Dari temuan tersebut peneliti akan mengungkapkan terlebih dahulu konflik tahun 1995, kemudian konflik tahun 2003 dan dilanjutkan dengan konflik tahun 2008

Kondisi konflik yang muncul ditengah masyarakat Saniang Baka dan Muaro Pingai yang tidak kunjung usai telah berlangsung sangat lama. Peristiwa konflik ini merupakan sejarah kelam bagi kedua nagari terbut. Situasi konflik dalam beberapa periode akan tergambar dalam uraian berikut.

A. Konflik 1995

Konflik atau pertentangan antara masyarakat Saniang Baka dan Muaro Pingai telah terjadi semenjak tahun 1975. Intensitas konflik kedua nagari lebih meningkat lagi sejak munculnya kebijakan otonomi daerah yaitu kembali kepada pemerintahan nagari. Kebijakan tersebut menuntut kepada nagari-nagari di Sumbar untuk kembali pada sistem pemerintahan nagari, padahal sebelumnya setiap nagari di samakan dengan sistem pemerintahan desa. Perubahan tersebut menyebabkan pecahnya nagari-nagari yang ada di Sumbar, sehingga satu nagari yang utuh dulunya bisa terpecah menjadi dua atau tiga nagari pasca kebijakan tersebut.

Kondisi seperti ini menyebabkan sulitnya menetapkan batas masing-masing wilayah, sebab pada awalnya merupakan satu kesatuan nagari. Kesulitan untuk menetapkan batas secara administratif dapat memicu konflik pada masyarakat nagari. Hal tersebut tengah dialami oleh masyarakat Nagari Saniang Baka dan Muaro Pingai yaitu berupa pertentangan kepentingan mengenai lahan yang terletak pada batas kedua nagari semenjak tahun 1975. Pada waktu itu ada usaha-usaha yang dilakukan oleh Dinar Lukman (orang Saniang Baka) untuk merebut lahan dari Muktar Malin (orang Muaro Pingai). Dinar Lukman merusak

tanaman Muktar Malin yang ada di area yang dipersoalkan. Kemudian Muktar Malin melaporkan Dinar Lukman ke Kapolsek X Koto Singkarak. Kepolisian memanggil Dinar Lukman dan Muktar Malin untuk menyelesaikan persoalan diantara Dinar Lukman dan Muktar Malin yang ditandai dengan pencabutan laporan oleh Muktar Malin.

Adanya proses penyelesaian dengan melibatkan Kapolsek X Koto Singkarak tetap tidak memberikan jalan damai bagi kedua wilayah tersebut. Konflik bergulir api dalam sekam. Dimana situasi konflik beulang pada tahun 2004.

B. Konflik 2003

Konflik ini berawal dari adanya objek yang disengketakan oleh masyarakat Saniang Baka dengan Muaro Pingai. Area yang disengketakan itu merupakan lahan seluas lebih kurang 700 Ha. Lahan ini terletak diperbatasan kedua nagari tepatnya dekat SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) di Air Abang. Lahan tersebut ditanami pohon jati oleh masyarakat Saniang Baka, sedangkan masyarakat Muaro Pingai menanami cengkeh. Di lahan itu juga pernah ada kegiatan galian C oleh PT. Arpex. Tanah yang disengketakan itu mengandung potensi ekonomi seperti kayu. Pada tanah ini juga terdapat potensi emas, batu bara, serta batu semen.

Pandangan ini dianut oleh kedua Nagari yang disebarkan secara turun temurun, walaupun belum bisa dipastikan kebenaran pandangan tersebut. Beberapa elemen masyarakat pada masing-masing nagari meyakini akan hal tersebut. Potensi yang dimiliki oleh alam tersebut menjadi salah satu alasan bagi masyarakat Saniang Baka dan Muaro Pingai untuk mempertahankan lahan itu. Pada awalnya telah dilakukan penambangan oleh PT.Arplex di lokasi yang

diperebutkan. Penambangan tersebut melakukan penggalian C, yaitu penggalian terhadap cadas dan pasir yang ada di sekitar bukit yang disengketakan.

Pada saat terjadinya penggalian itu terjadilah konflik antara masyarakat Nagari Saniang Baka dan Muaro Pingai. Konflik tersebut disebabkan oleh adanya penambangan yang dilakukan oleh PT.Arplex. penambangan yang dilakukan oleh PT.Arplex itu hanya mengantongi izin dari pihak Saniang Baka, sedangkan pihak Muaro Pingai tidak terlibat. Kondisi tersebut memancing amarah masyarakat Nagari Muaro Pingai, sebab mereka tidak diikutsertakan pada kontrak dengan perusahaan sedangkan lokasi galian tersebut berada di wilayah ulayat mereka.

Lahan yang dipersengketakan tersebut kemudian dijadikan “status quo” pada tahun 2003. *Status quo* tersebut munculnya karena adanya konflik pada tanggal 16 Desember 2003 lalu. Konflik tersebut ada karena penggalian yang dilakukan oleh PT.Arplex, sehingga penggalian tersebut dihentikan dan lahan itu distatus quokan. Setelah dijadikan status quo lahan tersebut tidak diizinkan untuk digarap oleh warga kedua nagari. Hal ini kemudian merugikan beberapa pihak yang sudah menanam bibit tanaman. Setelah beberapa lama masyarakat Muaro Pingai menggarap kembali lahan tersebut. Kegiatan tersebut kemudian diketahui oleh pihak Saniang Baka yang tinggal dekat dengan perbatasan (Jorong Aia Angek), aktivitas tersebut tentu saja dapat menimbulkan konflik kembali.

a. Kepentingan ekonomi kedua nagari

Konflik yang terjadi antara masyarakat Saniang Baka dan Muaro Pingai merupakan konflik terbuka yang telah memakan korban jiwa serta kerugian materi

oleh kedua belah pihak. Pemerintah telah berusaha meredamkan konflik dengan membuat pancang sementara yang berada pada 11 titik.

Pemancangan yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Solok merupakan hasil pertemuan padat tanggal 4 Oktober 2003. Pemancangan tersebut dilakukan pada 11 titik, yaitu patok A1 berlokasi pada ujung tanah Air Abang terletak dibelakang statiuon klimatologi dengan posisi pancang K.X 226 ke arah selatan menuju patok A2 dan patok ini berada dalam ulayat kaum Dt. Tan Basa suku koto - Saniang Baka. Patok A2 dipanjang pada ujung punggung bukit yang juga berada di belekang bagian atas kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Posisi titik pancangtersebut berada pada K.X 6079924128 menyeberangi Lurah Air Abang dan menuju patok A3 dan patok tersebut berada dalam ulayat Dt. Nan Salapan – Saniang Baka.

Patok A3 dipancang pada bukit yang berada di belakang SKB atau arah ke atas bukit Tan Mudo. Posisi titik pancang berada pada K.X 0673249 menyeberangi lurah Air Abang. Patok A4 berada pada punggung bukit belakang SMU 2 berseberangan lurah dengan patok A3. Patok ini berada pada K.X 0673076 menurun ke lurah Air Abang menuju patok A5 berada dalam kawasan ulayat Dt. Nan Salapan. Patok A5 berada pada pinggir lurah Air Abang arah barat A4 di bawah *Jambu Kaliang Dua*. Patok ini berada pada K.X 0672854 dan 9923581 menyeberangi lurah Air Abang dari patok A5 menuju patok A6 dan berada dalam ulayat Dt. Nan Salapan.

Patok A6 dipancang di pinggir lurah Batuang dekat batang kuini, surian, kulit manis di bawah bukit Sarang Alang. Posisi pancang ini berada pada K.X

0672489 dan 9923256 berjarak lebih kurang 300 M dari patok A5 dan berada dalam ulayat Dt. Nan Salapan. Patok A7 dipancang pada bukit Sarang Alang dengan titik koordinat 0672191 dan 9923256 dan masih berada dalam ulayat Dt. Nan Salapan. Patok A8 dipancang pada punggung bukit Tampuruang dengan posisi titik pancang K.X 0672011 dan 9922986 yang juga berada dalam wilayah ulayat Dt. Nan Salapan.

Patok A9 dipancang pada punggung bukit Kubang Duo dengan posisi titik pancang 0671671 dan 9922790 dan berada dalam ulayat Dt. Nan Salapan. Patok A10 dipancang pada ujung yaitu pada ekor sawah atau Lurah Dalam dengan posisi titik pancang 0671522 dan 9922790 yang berada dalam wilayah ulayat Kaum Dt. Pangeran – Muaro Pingai. Patok terakhir yaitu patok A11 yang berlokasi pada pertemuan Lurah Cangka dengan batang Muaro Pingai dengan posisi pancang K.X 0671091 dan 9922572 dan berada dalam ulayat Dt. Palindih – Muaro Pingai.²³

Penetapan pancang tersebut karena adanya perebutan lahan yang berada di perbatasan. Lahan yang diperebutkan memiliki nilai ekonomis yang sangat banyak, seperti adanya emas, potensi C (cadas dan pasir), hutannya yang lebat banyak terdapat jenis kayu, dan ladang garapan juga. Potensi emas itu hanya peneliti peroleh dari hasil wawancara Ketua KAN Muaro Pingai, di lapangan peneliti tidak ada mendapatkan adanya galian emas di sekitar wilayah tersebut. Ketua KAN Muaro Pingai mendapatkan informasi bahwa adanya kandungan emas itu melalui cerita turun temurun. Kata beliau niniak mamak Muaro Pingai

²³ Lampiran 3

mendapatkan informasi dari Belanda bahwa pada bukit yang ada di perbatasan tersebut terdapat kandungan emas.

Selain kandungan emas, pada lahan yang disengketakan juga terdapat potensi C. Potensi C itu berupa cadas, pasir, dan kerikil. Hal ini dibuktikan dengan adanya penambangan di bukit dekat dengan wilayah yang disengketakan. Sayangnya peneliti tidak bisa memperoleh bukti penambangan tersebut, sebab medan untuk mencapai tempat penambangan itu cukup terjal dan jauh dari pemukiman masyarakat.

Pada lahan yang disengketakan itu juga terdapat beberapa potensi lainnya, seperti hutan yang lebat dan area perladangan dan persawahan. Hutan pada wilayah yang disengketakan terdapat hasil hutan seperti rotan, kayu jati, kayu surian, karet dan jenis tanaman hutan lainnya. Sedangkan perladangannya berisi cengkeh, coklat, pokat, sawo, durian, rambutan, cabai, dan bawang. Area persawahan ditanami tanaman padi, sayur-sayuran (bayam, kangkung, dan daun singkong), serta jagung.

Konflik yang terjadi pada masyarakat itu menyebabkan masyarakat tidak dapat menggarap lahan tersebut, karena pemerintah kabupaten menetapkan sebagai lahan *Status Quo*. Lahan status quo ini tidak diperbolehkan digarap dan dikelola oleh masyarakat yang bertikai. Lahan ini berada dalam wewenang dan kekuasaan pemerintah sampai saat sekarang, sebab belum ada kejelasan status kepemilikan terhadap lahan yang berada di perbatasan ini.

Kondisi seperti ini merugikan kedua belah pihak, sebab masing-masing pihak tidak dapat menggarap atau memanfaatkan lahan yang memiliki potensi

ekonomi tersebut. Kerugian yang dirasakan tersebut berupa hilangnya mata pencarian masyarakat disekitar area yang berstatus quo. Kerugian tersebut disebabkan oleh masyarakat tidak dapat menggarap lahan yang merupakan sumber mata pencariannya. Lahan-lahan yang berada diperbatasan tersebut banyak ditanami cengkeh, coklat, padi, cabai, jagung, dan bawang.

Berikut hasil wawancara bersama Bapak Alfisdonyerman salah seorang penggarap lahan yang disengketakan berikut:

...ambo ndak ado punyo lahan yang ka digarap di tampek lain do. Sabab dari dulunyo ambo hanyo manggarap yang ado tu nyo. Dulunyo ambo hanyo mananam cangkeh jo coklatnyo. dek adonyo konflik, ambo patuah se jo keputusan pemerintah bahwa lahan tu ndak buliah digarap do. Padahal pariuk bareh ambo bagantuang jo lahan tu. Dek ndak ado yang ka digarap lai, ambo bisa batahan hiduik jo manolong urang ka sawah atau ka ladang, beko di agiah upah samo urang yang punyo sawah atau ladang. Kalau ndak mode itu ndak makan anak jo bini ambo do...

Terjemahan :

*... Saya tidak ada punya lahan yang akan digarap di tempat lain. Sebab dari dulunya saya hanya menggarap yang ada saja. Dulunya saya hanya menanam cengkeh dan coklat (kakao). Karena adanya konflik. Saya patuh saja sama keputusan pemerintah bahwa lahan tersebut tidak boleh digarap. Padahal kehidupan saya bergantung pada lahan tersebut. Karena tidak ada yang akan digarap lagi. Saya bisa bertahan hidup dengan menolong orang ke sawah atau ke ladang (buruh tani), nanti dikasih upah sama orang punya sawah atau ladang. Kalau tidak seperti itu, tidak akan makan anak dan istri saya...*²⁴

Wawancara dengan Bapak Alfisdonyerman terjadi dilakukan di Muaro Pingai. pada waktu siang hari pukul 14.00 sampai 15.00. Melalui hasil wawancara tersebut tergambarkan bahwa masyarakat sangat rugi dengan kondisi status quo lahan yang mereka miliki. Kerugian itu berupa hilangnya mata pencarian

²⁴ Wawancara bersama Bapak Alfisdonyerman pada tanggal 30 September 2020

masyarakat, sebab masyarakat hanya bergantung hidup pada lahan yang digarapnya. Hal yang senada diungkapkan pula oleh Bapak Farona seperti kutipan wawancara berikut:

...samanjak ado konflik ambo ndak dapek manggarap lahan yang lah biaso ambo garap. Ambo ndak punyo pulo lahan lain selain lahan yang biaso ambo garap tu. Jadi, dari pado ndak punyo panghasilan ambo ikuik-ikuik sajo samo kawan manjadi nalayan ka danau. Itu tajadi karano lahan yang ambo punyo tu distatus quokan oleh pemerintah dan ndak buliah ditanami do. Penghasilan ambo pun manurun jadinyo...

Terjemahan :

*...semanjak ada konflik saya tidak bisa menggarap lahan yang telah biasa saya garap. Saya tidak punya pula lahan lain selain lahan yang biasa saya garap itu. Jadi, dari pada tidak punya penghasilan saya ikut-ikutan saja sama teman menjadi nelayan ke danau. Itu terjadi karena lahan yang saya punya itu distatus quokan oleh pemerintah dan tidak boleh ditanami. Penghasilan saya pun menurun jadinya...*²⁵

Wawancara bersama bersama Bapak Farona terjadi di pinggir Danau Singkarak saat beliau mengambil hasil tangkapannya sekitar jam 07.00. Hasil wawancara bersama beliau menunjukkan bahwa rasa kecewa yang dialaminya. Kekecewaan tersebut disebabkan hilangnya mata pencarian beliau oleh status quo itu. Kondisi seperti ini menyebabkan menurunnya pendapatan yang dimilikinya, dimana pendapatannya dari hasil ladang dan sawah dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, membiayai sekolah anaknya, bahkan dapat membeli perlengkapan rumah lainnya serta alat transportasi seperti honda. Tapi pasca penetapan status quo tersebut, beliau terpaksa ikut bersama teman-temannya *manjalo ikan* ke danau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

c. Mempertahankan Keutuhan Wilayah Nagari

²⁵ Wawancara bersama Bapak Farona pada tanggal 01 Oktober 2020

Konflik antara dua komunitas masyarakat ini telah terjadi lebih kurang telah 40 tahun lamanya. Selama 40 tahun itu pula kedua belah pihak yang bertikai yaitu Saniang Baka dan Muaro Pingai saling mengklaim bahwa lahan yang berada di perbatasan merupakan kesatuan ulayat mereka. Akibatnya, kedua belah pihak memperebutkan lahan yang ada di perbatasan itu.

Perebutan atas lahan itulah yang kemudian memicu konflik pada tiga periode. Periode pertama dimulai oleh konflik yang terjadi pada tahun 1975. Konflik ini merupakan konflik antar personal, dimana masing-masing personal yang terlibat merupakan warga dari Saniang Baka dan Muaro Pingai. konflik ini kemudian diselesaikan di Polresta X Koto Singkarak dengan ditandatangani surat perjanjian damai.

Dua puluh tujuh tahun pasca konflik itu muncul lagi konflik dengan dua periode, yaitu tahun 2003 dan tahun 2008. Konflik pada tahun 2003 dan 2008 ini merupakan konflik kekerasan yang memakan korban jiwa serta harta benda. Korban jiwa yaitu meninggalnya salah seorang warga Muaro Pingai (*Pakiah Tamar*), sedangkan harta benda yang ikut lenyap yaitu 16 unit rumah, 1 gudang, 10 kandang sapi beserta sapinya, 3 kandang itik beserta itiknya, serta ribuan tanaman dengan berbagai jenis. Untuk lebih lengkapnya silahkan lihat lampiran 23.

Kondisi konflik seperti itu menyebabkan masyarakat melakukan perjuangan berupa upaya-upaya untuk memperjelas patok batas kedua nagari ini. Upaya-upaya tersebut ada dalam bentuk perundingan kedua belah pihak mengenai ketetapan patok batas. Selain perundingan itu, konflik yang terjadi juga merupakan salah satu bentuk perjuangan yang dilakukan oleh masing-masing

pihak. Perjuangan itu ditujukan untuk mempertahankan keutuhan wilayah masing-masing. Keinginan untuk mempertahankan wilayah ini tergambar pada hasil wawancara bersama Bapak Armansyah berikut:

... urang Saniang Baka hanyo ingin mampartahankan yang manjadi haknyo. Kami ndak pernah sakalipun mancubo untuak maambiak yang bukan punyo kami. Justru salamo ko hak-hak kami yang alah banyak diambiak urang lain....

Terjemahan :

...orang Saniang Baka hanya ingin mempertahankan yang menjadi haknya. Kami tidak pernah sekalipun mencoba untuk mengambil yang bukan punya kami. Justru selama ini hak-hak kami yang alah banyak dimbil orang lain...²⁶

Wawancara bersama Bapak Armansyah terjadi melalui komunikasi lewat *Handphone* pada pukul 19.30 sampai 20.00. Wawancara yang berlangsung dengan beliau melalui telepon karena lokasi tempat tinggal beliau yang jauh dan sulit di tempuh. Bapak Armansyah tinggal di Jorong Aia Angek, jorong ini berada di atas bukit dan akses jalan menuju ke sana sangat sulit. Jalan yang ada berada di tengah hutan. Pada saat peneliti ingin membuat janji dengan beliau, beliau melarang peneliti untuk datanng karena akses jalan menuju ke daerah itu cukup sulit untuk dilewati. Bapak Armasnyahpun menawarkan untuk wawancara melalui telepon saja, sehingga terjadilah komunikasi lewat telepon antara peneliti dan informan selama setengah jam. Sayang peneliti hanya dapat berkomunikasi hanya setengah jam, karena beliau hanya bersedia diwawancarai dengan durasi waktu setengah jam.

Pasca komunikasi dengan Bapak Armansyah itu , peneliti merasa kurang puas dengan hasil wawancara bersama beliau. Hasil wawancara bersama Bapak

²⁶ Hasil wawancara bersama Bapak Armansyah BA pada tanggal 01 Oktober 2020

Armansyah kemudian peneliti diskusikan bersama Bapak Sekretaris Wali Nagari Saniang Baka. Bersama Bapak Sekretaris Wali Nagari Saniang Baka inilah peneliti dapat melakukan wawancara dengan waktu yang lama, dengan sikap terbuka, dan bahkan dapat mewawancarai sebanyak empat kali. Adapun hasil wawancara bersama beliau mempertegas argumen yang disampaikan oleh Bapak Armansyah, berikut kutipan hasil wawancaranya:

...pertentangan yang terjadi antaro kami samo dunsanak di Muaro Pingai ndak jauh dari keinginan kami untuk mempertahankan keutuhan wilayah nagari kami ko. Sebab tanah tu lah diturunkan oleh urang tuo-tuo kami dulunyo...

Terjemahan :

...pertentangan yang terjadi antara kami sama saudara di Muaro Pingai tidak jauh dari keinginan kami untuk mempertahankan keutuhan wilayah nagari kami ini. Sebab, tanah itu telah diturunkan oleh orang tua-tua kami dhulunya...

Hasil wawancara ini menjelaskan bahwa masyarakat mempertahankan wilayah perbatasan itu karena, wilayah tersebut merupakan warisan leluhur mereka. Hal ini berbeda dengan alasan masyarakat Muaro Pingai dalam mempertahankan keutuhan wilayah nagarnya. Dalam hal ini peneliti menginterpretasikan bahwa adanya keinginan dari masyarakat Saniang Baka untuk mempertahankan lahan tersebut. Mereka menganggap lahan yang sedang diperebutkan itu adalah ulayat nagari Saniang Baka. Alasan inilah yang menyebabkan masyarakat Saniang Baka untuk mempertahankan keutuhan wilayah nagarnya.

Masyarakat Muaro Pingaipun memiliki alasan dalam mempertahankan keutuhan wilayah nagarnya. Adapun alasan itu disebabkan oleh adanya tindakan kekerasan yang melibatkan dua komunitas tersebut. Tindakan kekerasan itu

berupa bentrokan antara masyarakat Saniang Baka dan Muaro Pingai. Selain bentrokan itu juga terjadi aksi pembakaran terhadap 16 unit rumah beserta isi, 1 gudang, 11 kandang sapi beserta sapinya, 2 kandang itik beserta itiknya, 2 unit sepeda motor, serta ribuan batang tanaman. Itulah kerugian dari aksi pembakaran tersebut. Untuk lebih jelasnya kerugian silahkan lihat pada lampiran.... Alasan ini kemudian tergambarkan dalam kutipan hasil wawancara berikut:

...kami ndak bisa tarimo kajadian tahun 2008 sawah ladang kami dibaka, rumah kami dibaka, kandang taranak jo taranak kami dibaka. Kajadian tu ndak akan kami lupuan do. Tanah kami yo akan kami pertahankan sampai titiak darah panghabisan. Tanah kami adalah hak kami yang wajib kami pajuangkan...

Terjemahan :

*...kami tidak bisa terima kejadian tahun 2008 sawah ladang kami dibakar, rumah kami dibakar, kandang ternak dan ternak kami dibakar. Kejadian itu tidak akan kami lupakan. Tanah kami memang akan kami pertahankan sampai titik darah penghabisan. Tanah kami adalah hak kami yang wajin kami perjuangkan...*²⁷

Pihak yang banyak mengalami kerugian dari aksi pembakaran itu adalah masyarakat Muaro Pingai. Kerugian yang dirasakan oleh masyarakat Muaro Pingai itu berupa pembakaran seperti yang telah dijelaskan di atas. Peristiwa ini akhirnya mengakibatkan masyarakat Muaro Pingai merasa terdiskriminasi. Diskriminasi yang dirasakan oleh pihak Muaro Pingai ini tergambar pada kutipan wawancara bersama Ketua KAN Muaro Pingai berikut:

...pihak yang dirugian dek pembakaran tahun 2008 tu adalah Muaro Pingai, sebab rumah, sawah jo ladang, dan kandang taranak jo taranak kamipun di bakanyo. Kajadian bantuak iko mambuek kami maraso dianiayo...

Terjemahan :

²⁷ Hasil wawancara bersama Bapak Ales pada tanggal 02 Oktober 2020

...pihak yang dirugikan dalam pembakaran tahun 2008 itu adalah Muaro Pingai, sebab rumah, sawah dan ladang, serta kandang ternak dan ternak kamipun ikut dibakarnya. Kejadian seperti ini membuat kami merasa dianiaya..

Wawancara bersama Bapak Ales terjadi di rumah beliau pada waktu sore hari pukul 16.30 sampai 17.00. Hasil wawancara bersama beliau menjelaskan bahwa adanya keinginan untuk mempertahankan keutuhan wilayah yang mereka miliki sebab adanya diskriminasi yang mereka alami.

Pada tanggal 4 Oktober 2003 disepakatilah hasil musyawarah oleh kedua nagari. Musyawarah ini difasilitasi oleh Bupati Kabupaten Solok. Lalu BPN (Badan Pertanahan Nasional) menetapkan pancang sementara versi BPN di perbatasan kedua nagari untuk meredam konflik di antara kedua nagari. Kemudian pelanggaran demi pelanggaran terus dilakukan oleh kedua nagari dengan alasan masing-masing memiliki bukti-bukti yang kuat mengenai batas nagarinya. Bukti-bukti tersebut berupa peta wilayah yang dimiliki oleh masing-masing nagari, dimana peta tersebut terdapat perbedaan. Sehingga, batas nagari yang ditetapkan oleh BPN tersebut menjadi tidak efektif lagi.

Meskipun demikian, tetap konflik tahun 2003 ini juga tidak membuahkan hasil yang konkrit bagi kedua masyarakat yang berkonflik dimana potensi konflik terulang masih ada, sebab semacam proses resolusi konflik yang menggantung. Kemudian hari hal itu terbukti dengan terjadinya konflik tahun 2008.

C. Konflik 2008

Konflik pada periode ini terjadi karena adanya penggarapan pada wilayah perbatasan yang memancing amarah masyarakat Muaro Pingai. Dalam hal ini menurut masyarakat Saniang Baka, mereka telah menggarap lahan yang

disengketakan tersebut secara turun temurun. Menurut versi Saniang Baka, dahulunya niniak mamak atau orang yang dituakan oleh masyarakat Muaro Pingai meminjam lahan Nagari Saniang Baka untuk digarap. Kemudian anak dan kemenakan Nagari Muaro Pingai tidak mengetahui bahwa tanah tersebut dipinjam dari niniak mamak Saniang Baka. Pernyataan ini dipahami bersama oleh masyarakat Saniang Baka.

Bukti lain menjelaskan bahwa terdapat jorong Aia Angek yang merupakan salah satu jorong di Saniang Baka. Padahal menurut pihak Muaro Pingai jorong ini masuk wilayah mereka. Sedangkan secara administrasi jorong itu masuk ke wilayah Nagari Saniang Baka. Hal inilah yang dirasa janggal oleh masyarakat Saniang Baka disaat Muaro Pingai mengklaim lahan tersebut sebagai lahan mereka.

Pandangan tersebut dipahami bersama oleh masyarakat Saniang Baka seperti hasil wawancara dengan mantan Wali Nagari Saniang Baka Bapak Dasrizal Chandra, berikut kutipan wawancara:

...Dulunyo, urang Muaro Pingai minta ijin ka niniak mamak kami (niniak mamak Saniang Baka) untuk manggarap lahan kami. Niniak mamak kami maagiah ijin. Tapi, perjangiannyo hanyo untuk batanam tanaman mudonyo bantuak ubi, bawang, dan lado. Namun urang Muaro Pingai indak manepati janjinyo, inyo tetap mananam tanaman kareh mode cangkeh. Alun salasai masalah ko disebabkan urang-urang yang tuo-tuo indak maagiah pengertian ka anak kamanakannyo bahwa lahan itu milik urang Saniang Baka. Pas maningga urang tuo-tuo tu, anak kamanakannyo mengecekan tanah itu milik urangtuonyo dariturun temurun...

Terjemahan :

.... Dulunya, Orang Muaro Pingai meminta izin kepada niniak mamak kami (niniak mamak Saniang Baka) untuk menggarap lahan kami. Niniak mamak kami memberikan izin. Tapi perjanjiannya,

*hanya diperbolehkan untuk menanamkan tanaman muda seperti ubi, bawang, dan cabai. Namun orang Muaro Pingai tidak menepati janjinya, mereka tetap menanam tanaman keras seperti cengkeh. Belum selesai masalah dikarenakan orang yang tua tidak memberikan pengertian ke anak kemenakannya bahwa lahan tersebut milik Saniang Baka. Ketika orang yang tua-tua tersebut meninggal, anak kemenakannya mengklaim bahwa tanah tersebut milik orang tuanya dari turun-temurun...*²⁸

Sejalanannya dengan pernyataan di atas, Bapak Dasrizal juga menegaskan bahwa lahan yang disengketakan tersebut memang milik ulayat Saniang Baka. Lahan tersebut diizinkan oleh pemuka adat Saniang Baka untuk digarap bukan untuk dimiliki. Namun dikemudian hari pihak Muaro Pingai menganggap bahwa lahan tersebut merupakan ulayat mereka. Selain Bapak Dasrizal juga ada informan lain yaitu Yunisbar Marah Bansa.

Bapak Yunisbar ini memiliki pandangan yang sama dengan Bapak Dasrizal Candra. Menurut beliau lahan yang berada di perbatasan Nagari Muaro Pingai dan Saniang Baka merupakan ulayat Nagari Saniang Baka. Berikut kutipan wawancara bersama beliau :

...tanah nan disengketakan tu lah jaleh tanah ulayat kami, makonyo kami sebagai urang Saniang Baka indak akan merelakan sa jangkapun tanah kami diambiak urang. Kami hanyo mampatahankan hak kami, kami ndak pernah marabuik hak sia jo do. Urang kami pun ndak akan malarang urang Muaro Pingai menggarap lahan tu. Namun, kami paralu pengakuan dari Muaro Pingai bahwa lahan tu punyo Saniang Baka...

Terjemahan :

...tanah yang disengketakan itu telah jelas tanah ulayat kami, makanya kami sebagai orang Saniang Baka tidak akan merelakan se jengkalpun tanah kami diambil orang. Kami hanya mempertahankan hak kami, kami tidak pernah merebut hak siapa saja. Orang kami pun tidak akan melarng orang Muaro Pingai

²⁸ Hasil wawancara bersama Bapak Dasrizal Candra pada tanggal 03 Oktober 2020

*menggarap lahan tersebut. Namun, kami perlu pengakuan dari Muaro Pingai bahwa lahan itu milik Saniang Baka...*²⁹

Pada saat wawancara, Bapak Yunisbar Marah Bansa menjelaskan bahwa masyarakat Saniang Baka tidak akan merelakan tanah mereka diambil atau direbut sama pihak lain. Mereka akan mempertahankan tanah yang merupakan hak mereka dan tidak akan melarang pihak Muaro Pingai untuk melakukan penggarapan. Hal tersebut bisa terjadi dengan syarat pihak Muaro Pingai bersedia mengakui lahan tersebut milik mereka. Selain pemuka pemuda di Nagari Saniang Baka, pemuka adatpun ikut memiliki pemahan yang tidak jauh berbeda.

Pemuka adat (niniak mamak) Saniang Baka menganut pandangan bahwa lahan yang diperebutkan oleh kedua nagari selalu dimenangkan oleh Saniang Baka. Namun, masyarakat Muaro Pingai tidak bisa menerima hal tersebut. Hal ini tertuang dalam hasil wawancara dengan Ungku Amwa Dt. Mudo Nan Kuniang di bawah ini.

...konflik ko barawal dari tahun '75. Katiko tu urang Muaro Pingai mengecekan tanah ulayat kami sebagai tanah inyo. Balanjuik di tahun '83 terjadi baliak kajadian mamparabuikan tanah diantara kaduo nagari, tapi akhianyo kami tetap manang. Siap tu pado tahun 2003 BPN manetapkan bateh dan mamancang dilokasi yang diparabuikan tu. Namun Muaro Pingai indak bisa tarimo dan mambaka kantua-kantua jo rumah-rumah dan villa yang ado di parbatasan...

Terjemahan :

...konflik ini berawal dari tahun 1975. Ketika itu orang Muaro Pingai mengatakan tanah ulayat kami milik mereka. Berlanjut di tahun 1983 terjadi lagi kejadian memperebutkan tanah diantara kedua nagari, tapi akhirnya kami tetap menang. Setelah itu, pada tahun 2003 BPN menetapkan batas dan memancang dilokasi yang diperebutkan. Namun Muaro Pingai tidak bisa menerimanya dan

²⁹ Wawancara bersama Bapak Yunisbar Marah Bansa pada tanggal 03 Oktober 2020

*membakar kantor-kantor, rumah-rumah, dan villa yang ada di perbatasan...*³⁰

Wawancara bersama Ungku Amwa berlangsung di rumah beliau di Balai Mansiang. Wawancara bersama Ungku Amwa peneliti tidak perlu membuat janji, sebab beliau hanya beraktifitas di rumah saja. Peneliti melakukan wawancara pada siang hari pukul 11.00 sampai 12.00. Ungku Amwa ini telah berumur 80 tahun dan beliau ikut serta dalam menandatangani kesepakatan mengenai tapal batas nagari Saniang Baka dan Muaro Pingai. Hasil wawancara bersama beliau menjelaskan bahwa konflik tersebut telah sejak tahun 1975 sampai sekarang. Adanya penyelesaian yang ditengahi oleh pemerintah yaitu dalam bentuk penetapan patok batas yang pasang oleh BPN mendapat penolakan dari pihak Muaro Pingai.

Pandangan-pandangan di atas merupakan pembenaran yang diutarakan oleh pihak Saniang Baka bahwa lahan itu milik mereka. Pembenaran itu disebabkan oleh lahan tersebut telah digarap secara turun temurun oleh masyarakat Saniang Baka. Pada lahan ini juga terdapat salah satu jorong Saniang Baka yaitu Jorong Aia Angek. Jorong ini berada diatas bukit yang dipermasalahkan. Akses mencapai ke jorong tersebut sangat terjal sebab jalannya masih jalan tanah merah dan terdapat jurang. Hal tersebut menyulitkan penulis untuk melakukan penelitian ke lokasi untuk mendapatkan data.

Adapun bukti lain atas kepemilikan lahan tersebut oleh pihak Nagari Saniang Baka adalah dengan menerima pajak atas segala pembangunan yang terjadi pada lahan yang disengketakan tersebut. Pada lahan itu juga terdapat bukti

³⁰ Hasil wawancara bersama Ungku Amwa Dt. Mudo Nan Kuniang pada tanggal 04 Oktober 2020

kepemilikan pribadi oleh masyarakat Saniang Baka. Bukti-bukti itu berupa sertifikat tanah atas nama beberapa orang warga Saniang Baka. Sayangnya peneliti tidak bisa mendapatkan bukti sertifikat tanah itu, karena pihak Wali Nagari tidak memberitahukan orang yang memiliki sertifikat itu. Hal itulah yang menyebabkan masyarakat Saniang Baka tidak bisa merelakan tanah milik mereka diklaim begitu saja oleh masyarakat Muaro Pingai. Selain itu juga terdapat peta tahun 1975 yang terbitkan oleh BPN Kabupaten Solok yang dirivisi ulang pada tahun 1994 menyatakan bahwa lahan yang berada di perbatasan tersebut milik Saniang Baka. (Lihat lampiran 17)

Dari penjelasan di atas, menurut pihak Saniang Baka batas nagari mereka adalah berbatasan dengan SMA N 2 X Koto Singkarak yang dulunya adalah SKB (Sanggar Kegiatan Belajar). Batas ini tidak berbeda jauh dengan pancang yang dipasang oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) hanya berjarak sekitar 50 m.

b. Versi Muaro Pingai

Masyarakat Muaro Pingai menganggap bahwa lahan yang disengketakan itu merupakan lahan milik mereka. Menurut mereka lahan tersebut miliknya. Kepemilikan atas lahan itu dibuktikan dengan adanya dokumen *Keboelatan Kerapatan Negeri* pada tahun 1929. Isi dokumen ini menjelaskan tentang batas nagari Muaro Pingai.

Batas nagari Muaro Pingai menurut dokumen itu ada tiga titik. Tiga titik tersebut adalah : *pertama*, daerah *Padang Boengo* yang berbatasan dengan jalan berkali. *Kedua*, *Oeloe Mr. Pingai* dan dibatasi dengan jalan berkali. *Ketiga*,

Tarran Djaring dan *Tjoedan* yang juga dibatasi dengan jalan berkali. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 25.

Dalam dokumen itu terdapat beberapa orang yang terlibat dalam penandatanganan nota tersebut. Adapun orang-orang yang terlibat dalam nota tersebut adalah lima orang *Datuak* dari Muaro Pingai dan tiga orang perwakilan pemerintah pada masa kolonial. Lima orang datuak tersebut adalah Moebat gl. Datoek Tan Poetih, Sabat gl. Datoek Basa, Tewi gl. Datoek Kebasaran, Maloem gl. Datoek Tomanggoeng, dan Doeni j gl. Datoek Manindjoen. Tiga orang pejabat pemerintah itu adalah Datoek Madjo Lelo Batoeah (*Disctrictshoofd Solok*), Soetan Palangi (*Onderdistrictshoofd Singkarak*), dan Abdoe'rrahman (*Boschopzichter le. kl.Solok*). Jadi, berdasarkan dokumen tersebut wilayah yang disengketakan itu merupakan wilayah kesatuan Nagarai Muaro Pingai.

Penjelasan di atas dibenarkan oleh pihak Muaro Pingai seperti kutipan hasil wawancara berikut:

...lahan yang ado di perbatasan itu merupakan milik kami, sebab ada bukti dokumen tahun 1929 dan 1891 yang menjelaskan hal itu...

Terjemahan :

...lahan yang ada di perbatasan itu merupakan milik kami, sebab ada bukti dokumen tahun 1929 dan 1891 yang menjelaskan hal itu...³¹

Senada dengan Bapak Safri, Bapak Datuk Kabasaran juga mengatakan bahwa lahan yang disengketakan itu masih ulayat mereka, berikut kutipan wawancaranya:

³¹ Wawancara bersama Bapak Safri pada tanggal 10 Desember 2020

...lahan nan ado diperbatasan itu adalah lahan kami ko buktinyo (sambil memperlihatkan foto copy peta topografi tahun 1891 dan dokumen Keboelatan Kerapatan Negeri)...

Terjemahan:

...lahan yang ada diperbatasan itu adalah lahan kami ini buktinya (sambil memperlihatkan foto copy peta topografi tahun 1891 dan dokumen Keboelatan Kerapatan Negeri)...

Selain dokumen yang *Keboelatan Kerapatan Negeri* tahun 1929 itu, juga terdapat dokumen lain dalam bentuk Peta Opgenomen in 1887-1890 Door het Topographisch Bureau to Batavia Uitgegeven in het 1 ° & 2 ° Semeter 1891. Pada peta itu tergambar bahwa lahan yang disengketakan saat ini merupakan bagian dari wilayah Muaro Pingai.

Adanya peta yang disampaikan sebelumnya sebagai salah satu alasan masyarakat Muaro Pingai atas kepemilikan lahan di perbatasan digambarkan dalam kutipan wawancara berikut:

... Pada tahun 2004 BPN mamancang lokasi yang diparabuikan tu, namun bagi kami pemancangan itu ndak ado dasarnya. Jadi kami mempertanyakan dasar BPN tu mamancang sampai 11 pancang pado waktu tu. Sedangkan kami punyo peta topografi yang jadi bukti lahan tu adalah tamasuak Nagari Muaro Pingai, namun pemerintah indak menegaskan hal itu...

Terjemahan :

*... Pada tahun 2004 BPN memancang lokasi yang diperebutkan itu, namun bagi kami pemancangan itu tidak ada dasarnya. Jadi kami mempertanyakan dasar BPN tersebut memancang sampai 11 pancang pada waktu itu. Sedangkan kami punya peta topografi yang jadi bukti lahan tersebut adalah termasuk wilayah Nagari Muaro Pingai, namun pemerintah tidak menegaskan hal itu...*³²

³² Hasil wawancara bersama Bapak Zulkifli S.H pada tanggal 05 Oktober 2020

Wawancara bersama Bapak Zulkifli berlangsung dikediaman beliau pada waktu sore hari yaitu jam 16. 30 sampai 17.30. Wawancara dilakukan sore hari karena beliau dari pagi sampai sore pukul 16.00 memiliki aktifitas ke sawah. Berdasarkan hasil wawancara bersama beliau menjelaskan bahwa antara pemuka adat Saniang Baka dan Muaro Pingai terdapat suatu kesepakatan. Kesepakatan tersebut menyatakan bahwa lahan yang telah digarap oleh masing-masing nagari tidak boleh diganggu gugat. Akan tetapi, pada tahun 2003 terdapat penyerangan yang dialami oleh warga Muaro Pingai saat berladang oleh tiga orang yang berlogat jawa. Masyarakat Muaro Pingaipun beranggapan bahwa orang tersebut adalah orang suruhan pihak Saniang Baka. Kemudian pada tahun 2004 dipasangnya 11 pancang patok batas antara kedua nagari tersebut. Pemasangan pancang tersebut dilakukan oleh BPN Kabupaten Solok tersebut dirasa tidak memiliki dasar oleh pihak Muaro Pingai, sebab mereka memiliki bukti peta topografi tahun 1891.

Pembenaran lahan tersebut milik masyarakat Muaro Pingai dikarenakan lahan tersebut telah digarap secara turun temurun oleh masyarakat Muaro Pingai. Lahan yang dipersengketakan tersebut juga terdapat dalam peta topografi 1891 zaman Belanda dan juga dokumen *Keboelatan Kerapatan Nagari* tahun 1929. Peta dan dokumen tersebut menerangkan bahwa lahan yang disengketakan itu masuk wilayah Muaro Pingai. Hal tersebutlah yang membuat masyarakat Muaro Pingai tidak bisa menerima keputusan yang menyatakan lahan yang disengketakan itu adalah milik Saniang Baka.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka masyarakat Muaro Pingai mengatakan bahwa batas nagari mereka adalah lebih kurang 50 atau 100 meter sebelum SLTP Negeri 2 X Koto Singkarak, jika dilihat dari Muaro Pingai. Hal tersebut tercantum dalam peta topografi. Daerah yang dimasukan ke dalam wilayah Nagari Saniang Baka yaitu Jorong Aia Angek sebenarnya masuk wilayah Muaro Pingai.

D. Perbedaan Sikap Masyarakat Saniang Baka dan Muaro Pingai dalam Menyikapi Konflik Tapal Batas

Konflik yang melanda dua nagari di Kabupaten Solok terjadi antara masyarakat Saniang Baka dan Muaro Pingai. Konflik ini telah menjadi pemberitaan nasional. Pada berbagai media massa, baik media lokal maupun media nasional memberitakan konflik yang melibatkan dua nagari tersebut. Hal itu terdapat pada media cetak seperti koran Haluan, Singgalang dan Kompas selama satu pekan pasca terjadinya konflik. selain di media cetak tersebut juga diinformasikan melalui radio dan televisi baik nasional maupun lokal.

Kondisi konflik ini menyebabkan masyarakat kedua belah pihak berada dalam situasi yang tidak tenang. Hal tersebut terbukti dengan adanya markas Brimob di perbatasan ke dua nagari. Adanya markas itu untuk menjaga keamanan di lokasi perbatasan. Selain bukti adanya penjagaan oleh brimob , ketidak tenangan juga di utarakan langsung oleh salah satu anggota masyarakat. Berikut hasil percakapannya:

... dulu ndak tanang awak rasonyo do jo kondisi ko. Untuak kalua dari kampuang awak ndak barani do. Bialah awak mamiliah libur sakalo dari pado pai sakalo...

Terjemahan :

...dahulu tidak tenang saya rasanya dengan kondisi ini. Untuk keluar dari kampung saya tidak berani. Biarlah saya libur sekolah dari pada pergi sekolah...³³

Beliau mengatakan bahwa pasca konflik terjadi ada rasa takut bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan ke luar dari nagarinya. Anak-anak Muaro Pingai yang sekolah di luar takut untuk berangkat sekolah. Hal itu disebabkan oleh trauma yang mereka alami pasca kejadian tahun 2008.

Pada bulan April 2008 masyarakat Saniang Baka bermaksud untuk mempermanenkan pancang yang telah ditetapkan oleh BPN pada tahun 2003. Pemerintahan Nagari Saniang Baka sebelum memasang pancang tersebut telah memberitahunya kepada Pemerintah Kabupaten dan Wali Nagari Muaro Pingai. Pihak Bupati dan Wali Nagari Muaro Pingai tidak menggubris pemberitahuan dari Nagari Saniang Baka. Meskipun Pemerintah Kabupaten dan Wali Nagari Muaro Pingai tidak menggubris hal tersebut, namun masyarakat Saniang Baka tetap akan mempermanenkan pancang tersebut pada tanggal 1 Mei 2008. Pada saat akan dilakukan pemancangan tersebut datanglah lebih kurang sepuluh orang warga Muaro Pingai. Mereka berusaha membatalkan pemancangan ulang yang dilakukan oleh masyarakat Saniang Baka. Mereka menggunakan bom ikan untuk menakut-nakuti masyarakat Saniang Baka yang tengah bekerja. Perbuatan perwakilan dari Muaro Pingai tersebut menyulut emosi masyarakat Saniang Baka. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya pembakaran pemukiman masyarakat Muaro Pingai oleh warga Saniang Baka. Kejadian tersebut mengakibatkan sedikitnya 14 rumah terbakar.

³³ Wawancara bersama Meri warga Muaro Pingai pada tanggal 06 Desember 2020

Menurut versi Muaro Pingai, konflik di tahun 2008 tersebut sungguh begitu menyakitkan. Tidak sedikit kerugian yang mereka alami akibat pembakaran yang dilakukan oleh warga Saniang Baka. Masyarakat Muaro Pingai memaparkan bahwa lahan yang diperebutkan oleh kedua nagari berada di genggamannya Pemda sesuai dengan hasil keputusan Muspida pada tanggal 31 april 2008. Akan tetapi, pada malam harinya masyarakat Saniang Baka membakar rumah-rumah dekat peladangan tanpa sepengetahuan masyarakat Muaro Pingai. Kemudian ribuan massa Saniang Baka telah bersiap dan menduduki perbatasan nagari. Melihat hal tersebut Wali Nagari Muaro Pingai pun melapor ke kantor kepolisian pada pagi harinya karena massa Saniang Baka yang tidak seimbang dengan massa Muaro Pingai. Pihak kepolisian pun memastikan tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut.

Jumlah massa yang tidak seimbang menyebabkan masyarakat Muaro Pingai memilih mundur dan meninggalkan pemukiman. Kondisi tersebut membuat masyarakat Saniang Baka leluasa membakar rumah-rumah warga Muaro Pingai pada saat itu. Peristiwa tersebut mengakibatkan 14 unit rumah terbakar beserta 20 pondok ladang. Pihak Muaro Pingai merasa pemerintah begitu berpihak kepada Saniang Baka, hal ini terlihat jelas karena tidak ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka yang bertanggung jawab pada konflik tanggal 1 mei 2008 tersebut.

Konflik yang memiliki banyak dampak negatif bagi masyarakat sipil menuntut pemerintah untuk segera melakukan tindakan atas kejadian tersebut. Pemerintah Kabupaten Solokpun melakukan beberapa bentuk resolusi mengenai konflik tersebut. Resolusi tersebut akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Musyawarah pertama

Musyawarah pertama pasca terjadinya konflik 2003 diselenggarakan pada tanggal 10 Mei 2004. Pada tanggal 10 Mei 2004 tersebut terselenggara pertemuan di ruang kerja Bupati Solok. Pertemuan itu diselenggarakan dalam rangka penyelesaian sengketa batas ulayat antara kedua nagari. Pertemuan ini dilatar belakangi oleh terjadinya peristiwa kerusuhan yang melibatkan kedua nagari tersebut.

Kerusuhan itu terjadi pada tanggal 16 Desember tahun 2003. Pada saat itu terjadi pembakaran atas beberapa rumah penduduk dan sebuah gedung bekas UPP PRTPE. Gedung UPP PRTPE itu ditempati oleh UPTD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok. peristiwa itulah yang menyebabkan adanya beberapa kali pertemuan untuk menyelesaikan masalah itu.

Pada pertemuan yang diselenggarakan itu pemerintah Kabupaten Solok mengundang banyak pihak. Pihak-pihak yang diundang ada instansi pemerintah dan delegasi dari masing-masing nagari yang bertikai. Instansi pemerintah yang diundang adalah pihak Polresta Solok, perwakilan dari BPN Kabupaten Solok, Camat X Koto Singkarak, Camat Junjuang Sirih. Delegasi dari masing-masing masyarakat yang bertikai meliputi Wali Nagari masing-masing nagari, BMN masing-masing nagari, Ketua KAN masing-masing nagari, dan tokoh masyarakatnya.

Pertemuan tersebut hanya mewadahi untuk kedua belah pihak menyelesaikan pertikaian dengan jalan musyawarah. Pada pertemuan kedua belah pihak mengajukan beberapa butir kesepakatan. Berikut butir kesepakatan itu:

a. Kecamatan X Koto Singkarak

Pada pertemuan itu pihak Saniang Baka diwakilkan oleh Camat X Koto Singkarak. Adapun butir kesepakatan yang diajukan tersebut adalah:

- Masyarakat Nagari Saniang Baka menerima penetapan yang 11 titik koordinat batas oleh BPN.
- Masyarakat Saniang Baka mengusulkan beberapa orang perwakilan untuk menghadiri pertemuan selanjutnya. Perwakilan itu adalah Wali Nagari, Ketua KAN, Ketua BPN (BMN sekarang), Amwa Dt. Mudo Nan Kuniang, Dt. HK Maharajo, A. Dt Majo Basa, A. Rajo Nan Gadang, H. Syaharudin Rangkayo Mudo, Yunisbar Marah Bansa dan M. Sabri.

b. Muaro Pingai

Pada pertemuan ini pihak Muaro Pingai yang diwakili oleh Camat Junjung Sirih mengajukan beberapa poin kesepakatan, berikut uraiannya:

- Penyelesaian masalah tapal batas Nagari Muaro Pingai dengan Nagari Saniang Baka diselenggarakan di Kabupaten Solok.
- Pihak Muaro Pingai tetap berpegang teguh pada peta Topografi tahun 1891.
- Perwakilan dari pihak Muaro Pingai yang akan hadir dalam pertemuan selanjutnya adalah : Wali Nagari, Ketua KAN, Ketua BPN (BMN sekarang), Ketua Pemuda, dan Janain Malin Mudo.

2. Musyawarah kedua

Pasca pertemuan pada tanggal 19 Mei 2004, maka dilanjutkan dengan pertemuan pada tanggal 14 dan 17 Februari 2005 di ruang Pertemuan Bupati

Solok. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Solok yang juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Kasdim, Kasat Intel, Wakil Ketua DPRD, Asisten Pemerintahan, KTU Satpol PP, Camat X Koto Singakarak, Camat Junjung Sirih, Wali Nagari masing nagari, BPN (BMN) masing-masing nagari, KAN kedua nagari dan Kasubag Tata Pemerintahan.

Adapun hasil dari pertemuan ini adalah 1) wakil dari Nagari Muaro Pingai tetap pada pendiriannya yaitu batas nagari tetap sesuai dengan yang tertera dalam peta topografi 1891. 2) Pihak Saniang Baka tetap komit dengan peraturan atau keputusan mengenai 11 patok yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten. 3) Pemerintah akan mendatangkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat.

3. Musyawarah ke tiga

Pertemuan selanjutnya terjadi pada tanggal 19 Januari 2006 di ruang kerja Bupati Solok. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Solok dan dihadiri oleh Asisten Pemerintahan, Kadinas Hutbun, Kakan Pertanahan, Kabag Tata Pemerintahan, Muspika X Koto Singkarak dan Muspika Junjung Sirih. Pertemuan itu melanjutkan pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan ini telah hadir Kadinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat dan Kakanwil Pertanahan Sumatera Barat.

Di pertemuan ini menghasilkan kesepakatan bahwa dibentuk tim teknis untuk turun ke lapangan oleh pemerintah. Tim ini diturunkan dalam rangka mencari titik koordinat batas sesuai dengan peta yang ada di kantor Pertanahan dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

4. Musyawarah ke empat

Pada tanggal 10 Februari 2006 dilaksanakanlah pertemuan lanjutan di ruang pertemuan Bupati Solok. Pertemuan dipimpin langsung oleh Asisten Pemerintahan dan dihadiri oleh Kadinas Hutbun, Kakan Pertanahan, Kabag Tata Pemerintahan, Muspika X Koto Singkarak, Muspika Junjung Sirih, Wali Nagari kedua nagari, BPN (BMN) kedua nagari, KAN kedua nagari.

Pertemuan ini menghasilkan dua kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Kesepakatan pertama bahwa adanya toleransi titik batas yang ada di peta tahun 1891 buatan Belanda dengan realitas dilapangan (hak perseorangan tidak dirugikan. Kesepakatan ke dua meminta agar camat masing-masing kecamatan membuat inventaris atas hak perseorangan. Hak perseorang tersebut yang terdapat antara Rentang Pinang dan Puruk.

Melihat telah banyaknya musyawarah yang dilakukan pasca konflik 2003 seolah ironi dengan terjadinya kembali konflik yang lebih dahsyat pada tahun 2008. Pemerintah telah berupaya mencari jalan keluar atas konflik yang telah berjalan cukup lama ini. Sehingga pada tanggal 29 April 2008 dilaksanakannya musyawarah oleh pemerintah dengan kedua belah pihak. Pada musyawaran itu ditetapkanlah status quo pada wilayah yang disengketakan. Hasil musyawarah yang telah ada ini tidak membawa dampak terhadap penyelesaian konflik.

Musyawarah yang dilakukan dalam upaya penyelesaian konflik itu belum membuahkan hasil. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan sikap pasca pertemuan itu. Perbedaan sikap tersebut berupa penolakan dan penerimaan terhadap hasil keputusan. Penolakan itu dilihatkan leh Pihak Muaro Pingai.

Setiap hasil keputusan pada musyawarah itu ditolak oleh pihak Muaro Pingai. Penolakan yang dilakukan oleh pihak Muaro Pingai dilakukan pasca

pertemuan yang menetapkan patok batas sementara. Pada saat itu dasar penetapan patok batas itu hanya menggunakan satu sumber saja yaitu peta yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Solok pada tahun 1975 dan direvisi pada tahun 1994. Sedangkan Muaro Pingai memiliki peta Topografi yang di keluarkan oleh Belanda pada tahun 1891.

Berbeda hal dengan pihak Muaro Pingai, pihak Saniang Baka menerima setiap keputusan dan kesepakatan yang dibuat oleh pemerintah. Penerimaan itu terjadi pasca ditetapkannya hasil keputusan pada masing-masing pertemuan. Pihak Saniang Baka tidak pernah menolak atas keputusan yang ada. Keputusan yang ada dianggap telah sesuai dengan fakta yang ada di lapangan menurut masyarakat Saniang Baka.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian konflik antara masyarakat Nagari Saniang Baka dan masyarakat Nagari Muaro Pingai belum memuaskan kedua belah pihak. Hal tersebutlah yang menimbulkan dua bentuk sikap yang berbeda dalam menyikapi konflik tapal batas ini.

a adalah bom melotof, jerigen minyak, botol sprit, botol coca-cola, dan senjata rakitan serta bobok yang ditembakkan kepada salah seorang warga Muaro Pingai. Warga Muaro Pingai yang menjadi korban tersebut adalah Bapak Rusman. Alhamdulillah beliau masih hidup sampai saat sekarang. Namun peneliti diminta untuk tidak menemui beliau oleh pihak KAN Muaro Pingai. Sebab, ditakutkan pertanyaan peneliti dapat memancing emosi beliau dan dapat membangkitkan luka lama yang telah dipendamnya.

Kondisi yang seperti itu tidak menguntungkan bagi pihak Muaro Pingai untuk melakukan perlawanan. Sehingga, masyarakat Muaro Pingai memilih

mengungsi ke nagari tetangga yaitu Nagari Paninggahan. Pada saat tersebut masyarakat Muaro Pingai mengungsi ke lapangan Gando di Paninggahan.

Mendengar adanya aksi anarkis yang dilakukan oleh piha Saniang Baka menimbulkan reaksi dari pihak Paninggahan. Pada waktu itu pihak Paninggahan membawa spnaduk yang berisi tulisan “Masyarakat Paninggahan Menghambat Saniang Baka Untuk Masuk Ke Muaro Pingai. Jika Masih Dilanjutkan Maka, Warga Paninggahan Juga Akan Turut Membantu Masyarakat Muaro Pingai”. Itulah bunyi tulisan yang ada di spanduk yang dibuat oelh masyarakat Paninggahan. Melihat reaksi masyarakat Paninggahan ini, kemudian pihak Saniang Baka mulai mundur. Setelah masyarakat Saniang Baka mundur baru datang Aparat dari Kesatuan Brimob dan mobil pemadam kebakaran.

Sampai saat sekarang masih ada rumah bekas pembakaran tersebut. Rumah itu sengaja tidak perbaiki oleh masyarakat Muaro Pingai. Hal itu karena rumah tersebut akan dijadikan bukti atas tindakan yang dilakukan oleh pihak Saniang Baka. Peristiwa pembakaran tersebut ada didokumentasikan oleh pihak Muaro Pingai dalam bentuk video, namun sayangnya ketika peneliti ingin melihat video tersebut Ketua KAN Muaro Pingai tidak mengizinkan. Sebab menurut Ketua KAN itu, bagi siapa yang ingin melihat video tersebut harus ikut dalam penyelesaian konflik antara Saniang Baka dan Muaro Pingai serta harus bersumpah di Nagari Muaro Pingai. penelitipun belum siap untuk ikut etrlibat dalam proses penyelesaian konflik itu, sehingga peneliti tidak bisa mendapatkan video penyerangan itu.

Pasca kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh pihak Muaro Pingai dapat ditafsirkan Milyaran rupiah, sebab terdapat 16 rumah warga sipil yang

masing-masing rumah beserta isi bernilai sekitar lima ratus juta rupiah, belum ternak dan tanaman ladang yang dirusak. Kerugian yang dialami tersebut kemudian disampaikan oleh pihak Muaro Pingai ke pemerintah. Namun Pemerintah menanggapi hanya dengan memberikan dana bantuan 30 % dari kerugian yang dialami masyarakat Muaro Pingai. Selain menuntut kerugian pihak Muaro Pingai juga melakukan tuntutan ke Pemerintah Daerah untuk mengusut kasus tersebut, baik kerugian yang dialami warga maupun menetapkan pelaku atau dalang dari aksi pembakaran tersebut. Hal ini tertuang ke dalam surat tuntutan masyarakat Muaro Pingai yang ditujukan kepada Bupati Solok saat itu seperti yang terlampir dalam lampiran 20.

Pasca peristiwa itu dilaksanakan pertemuan pada tanggal 29 Juli 2008 di Aro Suka. Pada pertemuan tersebut dihasilkan sebuah keputusan dari Bupati Solok pada waktu itu yaitu Bapak Gusmal. Adapun hasil keputusannya hanya menetapkan nama-nama masyarakat Muaro Pingai yang mendapat bantuan karena mengalami kerugian harta benda akibat kerusakan itu. Bantuan tersebut diambil berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok. Keputusan Bupati Solok ini berlaku mulai dari tanggal 29 Juli 2008 sampai selesainya penerimaan bantuan oleh masyarakat korban konflik 1 Mei 2008.

Pertemuan tersebut hanya membahas mengenai data korban yang akan menerima dana bantuan dari pemerintah kabupaten, sedangkan mengenai kronologis kejadian tersebut tidak dibahas termasuk siapa aktor dari kerusakan tersebut. Hal ini menambah kekecewaan masyarakat Muaro Pingai terhadap pemerintah. Kerugian yang mereka alami hanya diganti dengan dana bantuan dan penetapan atas tersangka tidak dijelaskan.

Hasil wawancara bersama Bapak H. Nur Dt. Kabasaran menjelaskan bahwa dana bantuan yang diperoleh dari pemerintah tidak sebanding dengan kerugian yang dialami masyarakat Muaro Pingai. Hal tersebut akan terurai pada cuplikan hasil wawancara berikut:

...pemerintah ndak ado manetapkan palaku karusuhan ko, padahal kami lah maagiah bukti-bukti kajadian ka pemerintah. Bukti-bukti tu ado vidio pas kajadian dan ado pulo bukti yang nyata yaitu harato bando kami siap tabaka tamasuak rumah ambo. Adopun pemerintah menanggapi kajidian ko hanyo jo maagiah dana bantuan ka korban berupa uang santunan sebesar 30% dari kerugian yang kami alami...

Terjemahan:

...pemerintah tidak ada menetapkan pelaku kerusakan ini, padahal kami telah memberikan bukti-bukti kejadian ke pemerintah. Bukti-bukti itu ada video waktu kejadian dan ada pula bukti nyata yaitu harta benda kami yang habis terbakar termasuk rumah saya. Adapun pemerintah menanggapi kejadian ini hanya dengan memberikan dana bantuan ke korban berupa uang santunan sebesar 30% dari kerugian yang kami alami....³⁴

Wawancara bersama Bapak tersebut berlangsung di kediaman beliau pada waktu sore hari yaitu pukul 16.15 sampai 18.00. Pada mulanya beliau keberatan untuk peneliti wawancarai, sebab beliau takut data atau informasi yang beliau berikan disalah gunakan. Hal tersebut mungkin merupakan suatu bentuk kehati-hatian masyarakat Muaro Pingai, sebab hingga saat sekarang konflik di daerah itu masih belum selesai. Hasil wawancara bersama beliau menunjukan bahwa pemerintah tidak optimal dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Hal senada juga diutarakan oleh Wali Nagari Muaro Pingai pada waktu itu yaitu Bapak Zulkifli, S.H, sebagaimana terurai dari cuplikan hasil wawancara berikut :

³⁴ Hasil wawancara bersama Bapak H. Nur Dt. Kabasaran pada tanggal 10 November 2020

...pemerintah berdasarkan surat keputusan Bupati Solok mengatakan bahwa masyarakat yang mengalami kerugian pasca aksi pembakaran 1 Mei 2008 silam hanya mendapatkan dana bantuan senilai 30% dari kerugian yang dialami warga. Adapun penetapan tersangka terhadap aksi pembakaran tersebut tidak dibahas oleh pemerintah...

Dalam hal ini Bapak Zul menjelaskan bahwa pemerintah hanya memberikan dana bantuan bagi korban pembakaran bukan berupa ganti rugi. Penetapan tersangka pada kejadian itu juga tidak ditetapkan oleh pihak pemerintahan. Hal tersebut sangat disayangkan oleh pihak Muaro Pingai, sebab pihak Muaro Pingai memiliki bukti fisik atas siapa-siapa saja yang melakukan aksi tersebut.

Pembahasan mengenai tersangka penyerangan tersebut tidak ada dibahas oleh pemerintah. Pemerintah seolah tidak siap menetapkan tersangka pada kasus tersebut. Alasan pemerintah tidak menetapkan tersangkapun tidak ada dijelaskan kepada masyarakat yang menjadi korban. Hal tersebutlah yang menimbulkan kekecewaan besar bagi masyarakat Muaro Pingai terhadap pemerintah.

Beberapa point di ataslah yang menyebabkan pihak Muaro Pingai menolak setiap hasil keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pihak Muaro Pingai menolak dengan alasan bahwa pemerintah tidak objektif dalam penyelesaian konflik tersebut, sehingga keputusan dirasa berat sebelah. Keputusan yang dirasa berat sebelah juga diutarakan oleh Ibuk Yusmiati berikut:

...keputusan yang dibuek pemerintah tu barek sabalah, manuruik ambo pemerintah tu ba pihak ka Saniang Baka, mode penetapan patok batas, balupoan peta jaman Balandu dulu, adonyo pembakaran tahun 2008 ndak ado ditetapkan bahkan dilaporkan tersangkanyo do...

Terjemahan:

*...keputusan yang dibuat pemerintah itu berat sebelah. Menurut saya pemerintah itu berpihak ke Saniang Baka., seperti penetapan patok batas, dilupakan peta zaman Belanda dulu, adanya pembakaran tahun 2008 tidak ada ditetapkan bahkan dilaporkan tersangkanya...*³⁵

Wawancara bersama Ibuk Yus berlangsung di warungnya yang berada di depan Mesjid Raya Muaro Pingai. Wawancara berlangsung sekitar 20 menit, waktu itu peneliti istirahat selesai berjumpa dengan Ketua KAN Muaro Pingai. berdasarkan wawancara bersama beliau, peneliti ambil suatu kesimpulan bahwa masyarakat Muaro Pingai merasa bahwa pemerintah berat sebelah dalam mengambil sikap dalam menyelesaikan persoalan yang melibatkan dua nagari tersebut.

Berbeda dengan Bapak Firdaus beliau mengatakan bahwa pemerintah telah objektif dan rasional dalam mengambil keputusan serta tindakan terhadap persoalan tapal batas tersebut. Hal ini diutarakan seperti cuplikan hasil wawancara berikut:

...manuruik apak keputusan pemerintah tu alah objektif, sebab alasan atau penjelasan dari pengambilan keputusan tu dapek ditarimo secara rasional oleh masyarakat kami (masyarakat Saniang Baka)...

Terjemahan :

*...menurut Bapak keputusan pemerintah itu telah objektif, sebab alasan atau penjelasan dari pengambilan keputusan itu dapat diterima secara rasional oleh masyarakat kami (masyarakat Saniang Baka)...*³⁶

Wawancara bersama Bapak Firdaus berlangsung melalui telpon, sebab beliau tinggal di Jorong Aia Angek. Komunikasi lewat telpon itu terjadi pada pukul 19.30 selama 15 menit. Bapak Firdaus mengatakan bahwa beliau tidak

³⁵ Wawancara bersama Ibuk Yusmiati pada tanggal 10 November 2020

³⁶ Wawancara bersama Bapak Firdaus Kepala Jorong Aia Angek pada tanggal 28 September 2020

terlalu mengetahui banyak tentang persoalan tersebut, sehingga beliau menjawab sepengetahuannya saja. Kemudian, Bapak Firdaus menyarankan kepada peneliti untuk menghubungi Bapak Armansyah, sebab menurut beliau Bapak Armansyah mengetahui lebih banyak informasi dari pada beliau.

Tidak ditetapkannya tersangka pasca peristiwa 1 Mei 2008 itu, menyebabkan munculnya kekewaan olah masyarakat Muaro Pingai. Kekecewaan tersebut berwujud pada penerimaan terhadap semua hasil keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pihak muaro pingai merasa pemerintah takut dan tidak tegas dalam menyelesaikan kasus konflik tersebut. Sampai saat sekarang tersangka atau dalang atas aksi pembakaran dan penjarahan di Muaro Pingai itu tidak ditetapkan. Hal ini yang menyebabkan pihak Muaro Pingai menolak segala bentuk keputusan maupun aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Adapun pihak Saniang Baka menerima setiap keputusan yang ada disebabkan oleh mereka tidak berada pada pihak yang dirugikan. Setiap keputusan yang ada menurut pihak Muaro Pingai selalu menguntungkan pihak Saniang Baka. Pada kasus pembakaran dan penjarahan tidak ditetapkannya tersangka oleh pemerintah jelas sangat menguntungkan bagi pihak Saniang Baka. Apalagi tidak adanya tuntutan ganti rugi yang ditetapkan pemerintah kepada mereka.

Ketidak tegasan pemerintah inilah yang kemudian hari memunculkan dua bentuk sikap yang berbeda antara pihak yang bertikai. Meskipun pada saat sekarang konflik kekerasan tidak ada. Namun, konflik laten masih terjadi pada dua komunitas tersebut. Perbedaan sikap yang ditunjukkan oleh masing-masing pihak inilah yang menjadi konflik laten bagi kedua belah pihak tersebut.

Perbedaan sikap seperti yang diuraikan di atas menurut Edward Azar merupakan perjuangan yang berkepanjangan yang seringkali terjadi dengan penuh kekerasan oleh kelompok komunal untuk keperluan dasar seperti keamanan, pengakuan dan penerimaan, akses yang adil bagi institusi politik dan partisipasi ekonomi”.³⁷ Dalam peristiwa konflik yang melibatkan dua nagari ini adanya perjuangan yang dilakukan oleh masing-masing masyarakat untuk memperoleh keaman serta pengakuan terhadap kesatuan wilayah nagari masing-masing. Perjuangan yang dilakukan tersebut tidak akan berakhir sampai apa yang mereka harapkan dapat terpenuhi, jika belum terpenuhi maka mereka akan melakukan perjuangan terus. Hal tersebut tergambar pada konflik ini, dimana konflik antara Nagari Saniang Baka dan Muaro Pingai terjadi dari tahun 1975 sampai saat sekarang belum ada penyelesaian yang jelas.

Timbulnya konflik itu tidak terlepas dari keberadaan manusia dalam kehidupan berkelompok yang dinamis dalam proses perubahan menuju perkembangan dan kemajuan. Konflik muncul karena adanya pembagian kekuasaan dan penyebaran sumber daya alam yang tidak merata, akibatnya timbul kesenjangan antara yang memiliki otoritas dengan mereka yang tidak memiliki, serta kesenjangan dalam memperoleh sumber daya alam. Ketika kesenjangan tersebut memuncak, maka timbullah konflik.

Menurut Wirawan konflik terjadi melalui beberapa proses sehingga terlihatlah dinamika konflik dalam proses tersebut, adapun proses tersebut sebagai berikut:³⁸ *pertama*, terdapatnya faktor penyebab konflik. Pada penelitian ini faktor penyebab konflik secara umum disebabkan oleh dua hal yaitu perbedaan

³⁷ Op.cit Halm 111-113

³⁸ Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika. Halm 123-126

kepentingan serta perbedaan pandangan tentang kepemilikan lahan. Dua hal tersebutlah yang mempengaruhi munculnya konflik antara komunitas Saniang Baka dan Muaro Pingai. *Kedua*, fase laten atau fase yang tidak terlihat dimana potensi atau penyebab konflik telah ada, namun pihak-pihak yang terlibat konflik diam saja belum mengekspresikan pertentangan atau pertikaian yang dialaminya. Pada fase ini terjadi sekitar tahun 1970-an di Nagari Saniang Baka dan Muaro Pingai, sebab pada masa itu konflik masih bersifat laten belum muncul kepermukaan. *Ketiga*, fase pemicu, pada fase ini salah satu pihak atau kedua belah pihak telah mengekspresikan pertantang mereka. Ekspresi itu merupakan kejadian pemicu untuk terjadinya konflik secara terbuka. Pada konflik yang melibatkan Nagari Saniang Baka dan Muaro Pingai adapun pemicu dari konflik tersebut dimulai dari konflik pribadi yang melibat dua warga dari masing-masing.

Ke empat, fase eskalasi, jika fase pemicu konflik tidak terselesaikan dengan baik, maka konflik akan semakin membesar. Perbedaan pendapat atau pandangan semakin menajam sehingga menyebabkan terjadinya spiral konflik. Hal tersebut juga terjadi pada konflik yang terjadi antara dua nagari yang dibahas dalam penelitian ini, dimana awalnya konflik hanya persoalan individu adapun penyelesaian namun tidak maksimal, sehingga pada akhirnya konflik membesar menjadi konflik antar komunitas. *Ke lima*, fase krisis, fase ini ditandai dengan membesarnya konflik dan melibatkan pihak lain. Perilaku dari pihak yang berkonflik terkontrol sebab masing-masing yang terlibat konflik menjadi irasional dan emosional. Salah satu pihak yang merasa kuat melakukan agresi misalkan berupa merusak atau melakukan penyerangan, seperti yang terjadi pada konflik 2003 dan 2008 antar dua komunitas dalam penelitian ini. *Ke enam*, fase resolusi

konflik, pada fase ini dapat terjadi fenomena sebagai berikut: 1) tidak ada yang menang dan yang kalah sehingga konflikpun berhenti, dan 2) terjadinya solusi dengan mengatur sendiri atau melalui intervensi pihak ketiga. Pada penelitian ini fase resolusi tidak berjalan dengan maksimal, sebab sampai saat sekarang konflik tersebut hanya didiamkan belum selesai. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perbedaan sikap masyarakat terhadap hasil resolusi atau hasil mediasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk kepentingan bersama. *Ke tujuh*, fase pasca konflik, pada fase ini terjadi dua kemungkinan yaitu munculnya hubungan yang normal dan harmonis atau hubungan yang semakin regang antara pihak yang berkonflik. Dalam penelitian ini peneliti temukan bahwa pasca terjadinya konflik yang berupa tindakan pembakaran pada tahun 2008 lalu menimbulkan hubungan yang regang antara dua komunitas yang diteliti ini.

Menurut Dean G. Pruitt & Jeffrey Z Rubin³⁹, konflik juga berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Oleh karena itu dalam hal ini kadang digunakan juga istilah antagonisme ataupun perselisihan yang sinonim dengan konflik. pandangan Dean dan Rubin ini terlihat juga pada kondisi yang dialami oleh masyarakat Nagari Saniang Baka dan Muaro Pingai, dimana salah satu faktor penyebab konflik antar komunitas ini adalah perbedaan kepentingan. Dalam situasi konflik tersebut aspirasi atau keinginan yang dimiliki masing-masing masyarakat tidak terpenuhi, sehingga memunculkan yang namanya perselisihan yang kemudian berujung pada konflik.

³⁹. Dean G. Pruitt & Jeffrey Z Rubin, 2004. Teori Konflik Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 9-10

Berdasarkan penelitian ini terdapatnya peristiwa yang melibatkan masyarakat Nagari Saniang Baka dan Muaro Pingai banyak sekali kondisi yang mengabaikan kebutuhan dasar komunal. hal tersebut dikarenakan oleh kesulitan atau kewaspadaan pemerintah dalam mengambil keputusan, sehingga ada yang merasa terdiskriminasi oleh kondisi yang dialaminya. Kondisi seperti ini yang kemudian menimbulkan perjuangan yang berkelanjutan, sebab realita tidak sesuai dengan harapan yang dicita-citakan bersama.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa konflik tapal batas antara Nagari Saniang Baka dan Muaro Pingai merupakan konflik tapal batas. Konflik ini tidak hanya mempermasalahkan batas administrasi melainkan juga merupakan upaya untuk mempertahankan keutuhan wilayah ulayat kaum adat. Konflik tersebut sudah berlangsung dari tahun 1975 bahkan sampai tahun 2014 belum terselesaikan. Adapun Faktor penyebab konflik tapal batas ini di latar belakang oleh adanya perbedaan kepentingan dan perbedaan pandangan terhadap kepemilikan lahan, dimana didalamnya terdapat motif ekonomi.

Upaya penyelesaian konflik sudah dilakukan oleh kedua belah pihak diantaranya; Pertemuan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dengan nama Muspida dalam beberapa periode seperti : pertemuan tanggal 10 Mei 2004, pertemuan pada tanggal 19 Mei 2004 lalu dilanjutkan lagi pada tanggal 14 dan 15 Februari tahun 2005, pertemuan pada tanggal 19 Januari tahun 2006, dan terakhir pertemuan tanggal 10 Februari 2006. Pertemuan-pertemuan tersebut dilakukan dalam membahas persoalan yang muncul pada tanggal 16 Desember tahun 2003. Kemudian pasca pertemuan tanggal 10 Februari tersebut pada tanggal 1 Mei 2008 muncul lagi konflik dalam bentuk aksi pembakaran terhadap harta benda milik masyarakat Muaro Pingai.

Semua upaya yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak beserta pemerintah dan segenap unsur yang terkait belum menemui kata sepakat tentang

tapal batas antara keduanya. Adapun kesepakatan yang ada itupun belum bisa menyelesaikan pertikaian atau konflik yang terjadi antara dua komunitas ini. Untuk sementara sebelum ada keputusan hukum tetap yang dikeluarkan oleh pemerintah, daerah perbatasan yang dipersengketakan itu ditetapkan sebagai daerah status quo.

Adanya konsesus (penetapan daerah status quo) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berkonflik, justru merugikan masyarakat Nagari Saniang Baka dan Muaro Pingai. Apalagi keputusan ini untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Sebelum adanya penyelesaian yang jelas mengenai ketetapan atas wilayah perbatasan itu maka status wilayah itu masih bstatus quo.

Beberapa hal yang dia ataslah yang menyebabkan perbedaan sikap kedua nagrai itu. Perbedaan sikap itu tertuang dalam bentuk penolakan dan penerimaan atas keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Rekasi yang dimunculkanitu disebabkan oleh hal berikut: *Pertama* adanya kekeliruan yang terjadi oleh pemerintah dalam menetapkan patok batas sementara terhadap perbatasan tersebut. Kekeliruan tersebut dirasakan oleh Pihak Muaro Pingai sebab ada dasar hukum yang terlupakan.

Kedua penetapan daerah status quo dinilai merugikan ekonomi masyarakat, baik bagi masyarakat Nagari Saniang Baka maupun Muaro Pingai. selain itu pada wilayah status quo juga terdapat beberapa pelanggaran. Pelanggaran itu sperti adanya pembangunan tower HP dan KJA di lahan yang masih berstatus quo. Dimana pajak pembangunan itu diambil oleh pihak Saniang

Baka. Kemudian juga terdapat penggarapan lahan-lahan oleh masyarakat paada wilayah yang masih berstatus quo.

Ketiga, tidak tetapkannya tersangka pada peristiwa pembakaran pada pada tanggal 1 Mei tahun 2008 silam. Padahal pihak Muaro Pingai yang dirugikan pada peristiwa tersebut telah melayangkan surat tuntutan kepada Bupati Solok. Namun pihak pemerintah tidak menanggapi tuntutan itu. Pemerintah hanya melakukan ganti rugi dalam bentuk dana bantuan sebesar 30% dari kerugian yang dialami masing-masing warga Muaro Pingai.nya dari pemerintah daerah.

Ketiga hal di atas tersebutlah yang membuat masyarakat Nagari Saniang Baka dan Muaro Pingai berbeda sikap dalam menanggapi setiap keputusan yang ada. Hasil keputusan tersebut dianggap banyak yang tidak bersifat objektif, hal in dirasakan sekali oleh pihak Muaro Pingai. Pihak Muaro Pingai merasa terdiskriminasi oleh pemerintah terhadap semua keputusan. Meskipun pihak Saniang Baka menerima hasil setiap keputusan, namun pelanggaran-pelanggaran mengenai hasil keputusan tersebut tetap dilakukan juga oleh Pihak Saniang Baka.

Sampai saat sekarang kondisi pada wilayah tersebut memang telah aman atau tidak ada lagi tindakan konflik dalam bentuk tindakan kekerasan. Namun yang peneliti rasakan berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa masih terdapat potensi konflik pada masyarakat ini, sebab tidak ada keputusan yang benar-benar bisa diterima oleh kedua belah pihak sehingga kesepakatan damai belum terlaksana.

Mengacu kepada teori konflik Edward Azar yaitu teori *Protacted Social Conflict* (PSC). Teori ini berasumsi bahwa konflik itu ada untuk mepresentasikan

perjuangan yang berkepanjangan yang sering kali penuh kekerasan oleh kelompok komunal untuk keperluan dasar seperti keamanan, pengakuan dan penerimaan, akses yang adil bagi institusi politik dan partisipasi ekonomi. Pada penelitian ini dapat dilihat bahwa konflik yang terjadi antara komunitas yang bertikai terdapat perjuangan yang belum berakhir sampai saat sekarang. Perjuangan tersebut muncul karena adanya kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, dimana keutuhan wilayah masyarakat tidak terdapat kejelasan dan perekonomian masyarakat juga ikut terganggu karena adanya status quo pada wilayah yang disengeketakan.

Kondisi yang seperti ini menyebabkan munculnya perjuangan yang tiada henti oleh komunitas yang bertikai. Perjuangan tersebut terwujud pada situasi konflik kekerasan yang berulang-ulang. Konflik yang berulang-ulang itu dimulai dari tahun 1975 dengan melibatkan dua personil saja. Kemudian tahun 2003 terjadinya aksi pembakaran atas bangunan di perbatasan serta adanya korban jiwa. Selanjutnya tahun 2008 kembali terjadi aksi pembakaran atas rumah, kandang ternak dan ternak, pengrusakan tanaman, bahkan pembakaran pondok.

Perbedaan sikap yang terjadi juga merupakan bentuk perjuangan dua yang dilakukan oleh pihak yang bertikai. Perbedaan itu berupa penolakan dan penerimaan atas hasil keputusan yang ada. Oleh sebab itu, sampai saat sekarang konflik pada dua nagari ini dapat dikatakan belum selesai hanya persoalan yang ada didiamkan saja.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menjelaskan alasan perbedaan sikap masyarakat Nagari Saniang Baka dan Muaro Pingai terhadap kesepakatan bersama tentang penetapan tapal batas nagari. Meskipun demikian kekurangan yang terasa dalam penelitian ini adalah peneliti tidak mengkaji proses mediasi konflik secara mendalam, sebab peneliti lebih memfokuskan penelitian mengenai alasan perbedaan sikap masyarakat yang bertikai terhadap hasil kesepakatan yang dibuat bersama. Harapannya ini dapat menjadi saran bagi peneliti selanjutnya, yang ingin mengkaji tentang konflik tapal batas.

Kesulitan yang peneliti temui dalam penelitian ini diantaranya adalah sikap tertutup informan dalam memberikan informasi, hal ini sebabkan rasa ketakutan dan trauma yang dialami oleh informan. Ketakutan dan trauma itu disebabkan oleh teringatnya informan akan kejadian yang menyebabkan lenyapnya harta benda mereka serta takut peristiwa tersebut terulang kembali. Selain dari pada itu, untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan konflik tapal batas sangat sulit, alasannya yang peneliti peroleh dilapangan adalah karena konflik belum ada penyelesaiannya dan dokumen tersebut bersifat rahasia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pihak yang terkait dalam menyelesaikan konflik tapal batas.

DAFTAR PUSTAKA

- Dean G. Pruit & Jeffrey Z Rubin, 2004. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dingin, Mora. 2010. *Konflik Tapal Batas Antara Komunitas Sumpur dengan Komunitas Bungo Tanjung, Kabupaten Tanah Datar*. Skripsi FISIP Universitas Andalas.
- Fisher, Simon.dkk. 2001. “Mengelola Konflik : Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak”. Indonesia: The British Council.
- <http://konflikmadura-dayak.co.id>
- <http://www.waspada.co.id>, Diakses 25-08-12
- Keraf, Gorys. 1970. *Komposisi*. Jakarta: Nusa Indah.
- Liliweri, Alo. 2005. “Prasangka dan Konflik : Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural”. Yogyakarta. LkiS.
- Miall, Hugh. 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy. J. 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosda Karya.
- Pedoman Penetapan Dan Pemasangan Tanda Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan Nagari/Kelurahan . Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.
- Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.
- Radius. 2013. *Konflik Di Tapal Batas Propinsi Sumatera Barat Dan Propinsi Bengkulu : Studi Kasus tuntutan Masyarakat Nagari Silaut*. Skripsi FIS UNP.
- Roza, Novia. 2011. *Penyebab Konflik Antara Komunitas Saniang Baka dengan Muaro Pingai Kabupaten Solok*. Skripsi FISIP Universitas Andalas
- Slameto. 2010. “Belajar & Faktor-faktor yang Mempengaruhi”. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Sitorus, Felix MT. 1998. *Penelitian Kualitatif; Suatu Perkenalan*. Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu Sosial IPB.

Susanto, Haryadi. 2007. *Konflik Perbatasan Antara Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hulu di Dusun Libo : Penyebab dan Resolusi*. Skripsi FISIP Universitas Andalas.

Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.

www.padangekspres.com, diakses 30-08-2011